

Jurnal PPKn

Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Vol. 4 No. 2 Juli 2016

SURVEI TINGKAT KEPUASASAN ORANG TUA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN LEMBAGA SEKOLAH DASAR NEGERI GANDEKAN KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA (Algiyan Eko Prasetyo)

MEWUJUDKAN KULTUR SEKOLAH MELALUI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR (Ariskha Lianasari)

PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) UNTUK MENGATASI MASALAH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH SURAKARTA TAHUN 2016 (Dwi Cahaya Nurani)

PERAN GURU DALAM MENERAPKAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PEMBELAJARAN PKN DI SD NEGERI PETIR KABUPATEN BANYUMAS (Dwi Yuniasih Saputri)

PERAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN ENGHAYATAN PANCASILA DI SD NEGERI 03 KARANGANYAR (Elisabet Dyah Kusuma)

PENERAPAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI SDN JATITENGAH 1 SUKODONO SRAGEN (Kukuh Prasetya Arief Wicaksana)

PENGARUH INTERAKSI GURU DAN SISWA UNTUK MENINGKATKAN KEBEBASAN BERPENDAPAT SISWA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Meilan Tri Wuryani)

PERAN LSM/NGO DALAM PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN BAGI NARAPIDANA ANAK (Mitayuanisya Dyahnisita Nurani)

ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KnI) - JAWA TENGAH

Jurnal PPKn

ISSN 2303-9412

Penerbit

Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
(AP3KnI) - Jawa Tengah

Mitra Bestari

Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA. (Universitas Terbuka)
Prof. Dr. Sapriya, M.Ed. (Universitas Pendidikan Indonesia)
Dr. Harmanto, MPd. (Universitas Negeri Surabaya)
Dr. Samsuri, M.Ag. (Universitas Negeri Yogyakarta)
Dr. Nurul Zuriah, MSi. (Universitas Muhammadiyah Malang)

Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi

Dr. Triyanto, SH., M Hum.

Ketua Penyunting

Dr. Winarno, S Pd., M Si.

Anggota Dewan Penyunting

Arif Kriswahyudi, S Pd.
Siti Aminah, S Pd.

Alamat Redaksi

Gedung C FKIP UNS Surakarta
Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta
Telp/Faks. 0271-646939
Email: journal_ppkn@yahoo.co.id
Website: <http://ppkn.org>

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt atas terbitnya **Jurnal PPKn Volume 4 Nomor 2 Juli 2016**. Jurnal ini diterbitkan oleh Asosiasi PPKn Indonesia (AP3KnI) wilayah Jawa Tengah.

Jurnal PPKn berisi artikel pemikiran dan hasil penelitian dari para guru, dosen, dan pemerhati bidang Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn). Pada edisi kali ini dimuat 8 (delapan) buah artikel hasil penelitian bidang pendidikan kewarganegaraan. Jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk kegiatan penelitian, pembelajaran, maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan kewarganegaraan. Tujuan jangka panjang adalah memperkaya dimensi PKn akademik. Sasaran pembaca dari Jurnal PPKn adalah para guru, dosen, mahasiswa, dan pemerhati bidang pendidikan kewarganegaraan.

Redaksi mengucapkan terimakasih kepada para mitra bestari yang telah bekerjasama dengan baik demi terbitnya jurnal ini.

Surakarta, Juli 2016

Redaksi

DAFTAR ISI

Hal

**SURVEI TINGKAT KEPUASASAN ORANG TUA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN
PENDIDIKAN LEMBAGA SEKOLAH DASAR NEGERI GANDEKAN KECAMATAN JEBRES
KOTA SURAKARTA (Algiyan Eko Prasetyo)** 916- 932

**MEWUJUDKAN KULTUR SEKOLAH MELALUI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DI
SEKOLAH DASAR (Ariskha Lianasari)** 933-946

**PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) UNTUK MENGATASI MASALAH
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH SURAKARTA TAHUN 2016 (Dwi Cahaya
Nurani)** 947-954

**PERAN GURU DALAM MENERAPKAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI
PEMBELAJARAN PKN DI SD NEGERI PETIR KABUPATEN BANYUMAS (Dwi Yuniasih
Saputri)** 955-970

**PERAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN ENGHAYATAN
PANCASILA DI SD NEGERI 03 KARANGANYAR (Elisabet Dyah Kusuma)** 971-984

**PENERAPAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI SDN
JATITENGAH 1 SUKODONO SRAGEN (Kukuh Prasetya Arief Wicaksana)** 985-994

**PENGARUH INTERAKSI GURU DAN SISWA UNTUK MENINGKATKAN KEBEBASAN
BERPENDAPAT SISWA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(Meilan Tri Wuryani)** 995-1002

**PERAN LSM/NGO DALAM PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN BAGI NARAPIDANA
ANAK (Mitayuanisya Dyahnisita Nurani)** 1003-1016

SURVEI TINGKAT KEPUASASAN ORANG TUA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN LEMBAGA SEKOLAH DASAR NEGERI GANDEKAN KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA

Algiyan Eko Prasetya

Prodi S2 PGSD Pascasarjana UNS

Email: AlgiyanEkoPrasetyo@student.uns.ac.id

ABSTRACT. *This research was conducted in order to determine the satisfaction of parents in : 1) towards education. 2) facilities, infrastructure and management 3) the content standards, and assessment process 4) level of achievement, in primary schools Gandekan Jebres District of Surakarta. Using quantitative and descriptive approach. The population were all parents of students of SD Negeri Gandekan many as 138 with 100 people samples. The data collection technique with questionnaires and documentation. Test validity of using professional judgment by fellow academics S2 Elementary School Teacher UNS then proceed with Product Moment Correlation formula of Karl Pearson and reliability test using Cronbach Alpha formula. Data were analyzed using univariate analysis of attributes. This study shows that satisfaction of parents in: 1) educators gain the highest score (3.44), and the lowest score (2.98). 2) facilities, infrastructure and management to gain the highest score (3.13), the lowest score (2.6). 3) content standards, processes and valuation gains the highest score (3.17). The lowest score (2.77). 4) level of achievement of development gains the highest score (3.11). The lowest score (2.9).*

Keywords: *Satisfaction of Parents, Educational Services, Primary School Institution*

PENDAHULUAN

Masalah kualitas merupakan salah satu bagian penting dan sangat perlu mendapatkan perhatian yang serius bagi pimpinan perusahaan dalam menjalankan strategi operasinya. Dalam era *global competition* akan terjadi

kecenderungan proses pengembangan produk/jasa yang lebih baik, canggih, berkualitas dan lebih murah jika dibandingkan dengan produk sebelumnya hal ini disebabkan oleh perubahan yang begitu cepat dalam bidang teknologi. Operasi perusahaan manufaktur

maupun perusahaan jasa dalam era globalisasi dituntut menjadi unggul dalam daya saing maupun unggul dalam kualitas produk, bahkan harus menempatkan *customer satisfaction* pada barisan depan dari visi dan misi perusahaan.

Kualitas selalu menjadi target penting dari sebuah proses produksi manufaktur maupun jasa (*tangible* atau *intangibile* produk) baik pada tatanan dalam perusahaan sendiri, antar perusahaan dalam negara tertentu, perusahaan antar benua tertentu dan akhirnya perusahaan dunia, masalah kualitas adalah menjadi syarat kelangsungan hidup perusahaan dan tiket untuk menembus perdagangan internasional di era perdagangan bebas saat ini. Penekanan kualitas yang mengarah kepada *customer satisfaction* pada bidang jasa lebih intens dilakukan oleh perusahaan, hal ini disebabkan karena sifat produk yang tidak nyata/intangible sehingga setiap konsumen memiliki persepsi yang berbeda tentang kualitas dari jasa yang dihasilkan.

Hal tersebut juga selayaknya diperhatikan oleh penyedia layanan pendidikan khususnya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu lembaga yang memberikan/menyelenggarakan pelayanan berupa pendidikan kepada pelanggannya (siswa) dalam rangka menaikkan kualitas hidup melalui pendidikan yang

diselenggarakan dengan cara yang sistematis dan konsisten. Lembaga pendidikan diyakini mempunyai tugas yang sangat penting yaitu menyiapkan sumber daya manusia agar mampu bertindak sebagai agen perubahan dan transformasi sosial menuju terciptanya masyarakat yang positif serta lebih baik.

Pendidikan dasar bagi orangtua sekarang adalah suatu tahapan pendidikan yang penting, dimana nilai-nilai dasar anak mulai ditanamkan. Mereka beranggapan bahwa pendidikan dasar yang baik akan mempengaruhi perkembangan pemikiran anak selanjutnya. Dengan demikian para orang tua murid mestilah akan memasukkan ke sekolah mana yang mengutamakan mutu penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Gandekan kecamatan Jebres Kota Surakarta pada tanggal 17 Desember 2016. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Suharsimi Arikunto (2006: 234) mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian.

Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian dengan data penelitiannya berupa angka-angka, dan analisisnya menggunakan statistik (Sugiyono, 2009: 7). Dipilihnya pendekatan kuantitatif karena pada penelitian ini dalam proses memperoleh data yang digunakan berupa angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang diteliti serta melihat dan mendeskripsikan kemudian di analisis dan disimpulkan sebagai hasil penelitian.

Penelitian ini mengambil subjek orang tua siswa SD Negeri Gandekan Kecamatan Jebres Kota Surakarta sebanyak 138 orang. Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 145), subjek penelitian yaitu subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian ini adalah seluruh orang.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket sebagai data utama dan dokumentasi sebagai data pendukung. Menurut Arikunto (2006: 151) angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Metode angket dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi tentang kepuasan orang tua terhadap layanan pendidikan lembaga Sekolah Dasar Negeri Gandekan

Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

Agar penyusunan instrumen dapat dilakukan dengan mudah dan tepat, perlu disusun kisi-kisi instrumen penelitian. Kisi-kisi instrumen disusun mengacu teori Kotler tentang dimensi pokok kualitas jasa yang dapat dipenuhi untuk menciptakan kepuasan pelanggan.

Validitas penelitian ini menggunakan validitas isi yaitu untuk mengetahui kecocokan pada setiap item dengan bahan yang harus diketahui. Validitas isi menurut Saifuddin Azwar (2013: 43), merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional atau lewat *professional judgement*. Selanjutnya, validitas butir dilakukan untuk menguji setiap *item* yang terdapat pada instrumen penelitian. Setiap item pernyataan sebagai hasil penjabaran indikator dari variabel kepuasan orang tua siswa terhadap layanan pendidikan lembaga Sekolah Dasar perlu diuji dengan menggunakan analisis *item*.

Kemudian, analisis *item* (butir) dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total. Pengukuran validitas butir menggunakan teknik korelasi *product moment* dengan angka kasar yang dikemukakan oleh Pearson.

Sesuai dengan tipe penelitian yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, maka data yang

diperoleh selanjutnya di analisis secara kuantitatif, lalu untuk mengetahui kepuasan orang tua terhadap layanan pendidikan lembaga Sekolah Dasar maka digunakan teknik analisis tabulasi. Tabulasi yaitu pengelolaan data dengan memindahkan jawaban yang terdapat dalam angket ke dalam tabulasi atau tabel. Kemudian setelah data di olah, sehingga hasil angket dinyatakan sah, maka selanjutnya melakukan analisa data dengan deskriptif kuantitatif dengan persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kepuasan adalah suatu perasaan manusia setelah mendapatkan kinerja atau hasil yang telah sesuai dengan harapannya. Dalam konteks teori costumer behavior, kepuasan lebih banyak didefinisikan dari perspektif pengalaman konsumen setelah mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk atau jasa (Irawan, 2009:3). Fandy Tjiptono (2001) menyebutkan kepuasan sebagai suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Menurut Supranto (2006: 44) istilah kepuasan pelanggan merupakan label yang digunakan oleh pelanggan untuk meringkas suatu himpunan aksi atau tindakan yang terlihat, terkait dengan produk atau jasa.

Tingkat kepuasan individu pasti berbeda-beda, hal ini

dikarenakan tingkat harapan setiap individu terhadap suatu kinerja juga berbeda-beda. Setiap individu yang memiliki tingkat harapan yang rendah, maka dirinya akan lebih cepat merasa puas. Sebaliknya, setiap individu yang memiliki harapan tinggi terhadap suatu kinerja, maka individu tersebut akan lebih sulit untuk mendapatkan kepuasan. Menurut Richard Oliver dalam Handi Irawan (2009: 3) "kepuasan adalah respon pemenuhan dari konsumen. Kepuasan adalah hasil dari penilaian dari konsumen bahwa produk atau pelayanan telah memberikan tingkat kenikmatan dimana tingkat pemenuhan ini bias lebih atau kurang".

Kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi secara langsung oleh kualitas pelayanan yang diberikan. Kolter (2005: 8) dalam Jenet Manyi Agbor (2011: 2) mengemukakan "quality has a direct satisfaction". Tingkat kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh berbagai factor. Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi kepuasan terhadap kualitas jasa atau pelayanan yang dapat dirincikan sebagai berikut:

(Philip Kotler dalam Supranto, 2011: 231)

1. Keandalan (reliability) : kemampuan penyedia layanan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan konsisten dan terpercaya
2. Keresponsifan (responsiveness) : kemauan untuk membantu

pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat atau ketanggapan

3. Keyakinan (confidence) : pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau "assurance"
4. Empati (emphaty) : adalah adanya rasa peduli memberi perhatian pribadi kepada pelanggan
5. Berwujud (tangible) : penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan media komunikasi. Jadi, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap suatu pelayanan adalah keandalan, keresponsifan atau ketanggapan, keyakinan, empati, dan berwujud.

Fungsi dan peranan sekolah diatur dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Peranan sekolah sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga, maka sekolah bertugas mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang dibawa dari keluarganya. Sebagian besar pembentukan kecerdasan (pengertian), sikap dan minat sebagai bagian dari pembentukan kepribadian, dilaksanakan oleh sekolah. Kenyataan ini

menunjukkan betapa penting dan besar pengaruh sekolah (Sarwono, 1997: 34).

Pembahasan

Dari hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan teknik tabulasi dapat dijabarkan yaitu sebagai berikut.

A. Kepuasan Orang Tua Terhadap Pendidik

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua menyatakan puas terhadap pendidik SD Negeri Gandekan Kecamatan Jebres. Kepuasan orang tua terhadap pendidik terdiri dari dua dimensi kepuasan yaitu dimensi kesigapan dengan indikator kepuasan orang tua terhadap kemampuan guru dalam membimbing anak, selanjutnya dimensi empati yang terbagi menjadi dua indikator yaitu kepuasan orang tua terhadap komunikasi yang dilakukan guru dan kepuasan orang tua terhadap guru dalam bersikap dan berperilaku pada anak.

1. Kepuasan Orang Tua terhadap kemampuan guru membimbing anak

Hasil analisis data menunjukan bahwa indikator pertama dalam pernyataan pertama yaitu kemampuan guru dalam membimbing anak,

hasilnya pada tabel berikut.

Tabel 3. persentase data angket orang tua terhadap kemampuan guru dalam membimbing anak

No Butir soal	Butir Pernyataan	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Kemampuan guru dalam membimbing anak	Sangat Puas	24	24%
		Puas	76	76%
		Kurang Puas	0	0%
		Sangat Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%

2. Kepuasan Orang Tua terhadap komunikasi yang dilakukan guru
 Hasil analisis data indikator kedua dituangkan dalam tiga butir pernyataan menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua merasa puas dengan cara guru menyambut kedatangan anak dan mendampingi saat penjemputan. Tidak ada satupun orang tua yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas. Begitu juga dengan guru dalam mengkomunikasikan perkembangan anak. Sebagian besar menyatakan puas, dan hanya beberapa orang

yang menyatakan sangat puas dan kurang puas. Guru mengkomunikasikan program sekolah dirasa sudah memuaskan orang tua siswa dinyatakan bahwa sebagian besar orang tua merasa puas dan beberapa lainnya menyatakan sangat puas dan kurang puas.

Tabel 4. Persentase data angket Orang Tua terhadap komunikasi yang dilakukan guru

No . Butir soal	Butir Pernyataan	Kategori	Frekuensi	Persentase
2.	Komunikasi yang dilakukan guru	Sangat Puas	44	44%
		Puas	56	56%
		Kurang Puas	0	0%
		Sangat Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%
No . Butir soal	Butir Pernyataan	Kategori	Frekuensi	Persentase
3.	Komunikasi perkembangan anak	Sangat Puas	15	15%
		Puas	68	68%
		Kurang Puas	17	17%
		Sangat Tidak Puas	0	0%

		Puas		
Total			100	100%
No . Bu tir so al	Butir Pernyata an	Kete gori	Freku ensi	Persen tase
4.	Kemamp uan guru dalam membim bing anak	Sang at Puas	9	9%
		Puas	82	82%
		Kura ng Puas	9	9%
		Sang at Tida k Puas	0	0%
Total			100	100%

3. Kepuasan Orang Tua terhadap guru dalam bersikap dan berperilaku pada anak
 Hasil analisis data menunjukkan bahwa indikator ketiga dituangkan dalam empat butir pernyataan. Hasilnya pada gambar berikut: sebagian besar orang tua merasa puas dengan penampilan guru dari segi kebersihan dan kebugaran. Namun masih ada orang tua yang merasa kurang dengan penampilan guru dari segi kebersihan dan kebugaran sebesar 3%. Hal ini berarti penampilan guru dari segi kebersihan dan kebugaran menjadi

sangat penting; sebagian besar orang tua merasa puas dengan keterampilan guru dalam menangani anak. Tidak ada satupun orang tua yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas. Hal ini berarti guru sudah memiliki keterampilan dalam menangani anak sesuai apa yang diinginkan orang tua; sebagian besar orang tua merasa puas dengan perilaku guru dalam berinteraksi. Namun demikian sebesar 3% orang tua ada yang merasa kurang puas. Oleh karena itu, hendaknya guru dapat meningkatkan perilaku dalam berinteraksi menjadi lebih baik; sebagian besar responden merasa puas dengan keteladanan guru. Hal ini berarti keteladanan guru merupakan hal yang sangat penting bagi orang tua dan anak. Hal ini berhubungan dengan kompetensi kepribadian yang harus dimiliki guru. Sebagai seorang guru harus mampu bersikap yang baik sehingga dapat menjadi contoh teladan bagi anak didik.

Tabel 5. Persentase data angket Orang Tua terhadap guru dalam berperilaku pada anak

No . Butir soal	Butir Pernyataan	Kete gori	Freku ensi	Persen tase
5.	Penampilan guru dari segi kebersihan dan kebugaran	Sang at Puas	18	18%
		Puas	79	79%
		Kura ng Puas	3	3%
		Sang at Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%
No . Butir soal	Butir Pernyataan	Kete gori	Freku ensi	Persen tase
6.	Keterampilan guru dalam menangani anak	Sang at Puas	13	13%
		Puas	87	87%
		Kura ng Puas	3	3%
		Sang at Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%
No . Butir soal	Butir Pernyataan	Kete gori	Freku ensi	Persen tase
7.	Perilaku guru dalam berinteraksi	Sang at Puas	21	21%
		Puas	76	76%
		Kura ng Puas	3	3%

		Sang at Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%
No . Butir soal	Butir Pernyataan	Kete gori	Freku ensi	Persen tase
8.	Keteladanan guru	Sang at Puas	25	25%
		Puas	75	75%
		Kura ng Puas	0	0%
		Sang at Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%

B. Kepuasan Orang Tua Siswa Terhadap Sarana, Prasarana dan Pengelolaan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua menyatakan puas terhadap sarana, prasarana dan pengelolaan di SD Negeri Gandekan Kecamatan Jebres. Kepuasan orang tua terhadap sarana, prasarana dan pengelolaan sekolah ditinjau dari dimensi *tangible* (penampilan fisik penyedia jasa). Dimensi tersebut terdiri dari beberapa indikator diantaranya yaitu kepuasan orang tua terhadap ketersediaan prasarana sekolah, kepuasan orang tua terhadap ketersediaan sarana yang menunjang proses pembelajaran, kepuasan orang tua terhadap

pengelolaan sarana dan prasarana sekolah.

1. Kepuasan Orang Tua terhadap ketersediaan prasarana sekolah

Hasil analisis data menunjukkan bahwa indikator kepuasan orang tua terhadap ketersediaan prasarana sekolah dituangkan dalam tiga butir pernyataan menyatakan bahwa: sebagian besar orang tua merasa puas dengan kebersihan area sekolah. Namun masih ada beberapa orang tua yang merasa kurang puas dengan kebersihan area sekolah sebesar 28%. Hal ini berarti pihak sekolah sebaiknya dapat meningkatkan kebersihan area sekolah agar kepuasan orang tua semakin tinggi; sebagian besar orang tua merasa puas terhadap ketersediaan prasarana sekolah. Namun terdapat 10% orang tua yang merasa kurang puas. Oleh karena itu, kemudahan akses menuju sekolah merupakan hal yang penting bagi sekolah; sebagian besar orang tua merasa puas terhadap ketersediaan prasarana sekolah. Namun demikian sebesar 40% orang tua yang menyatakan kurang

puas dengan kondisi fisik gedung sekolah. Hal ini penting untuk diperhatikan pihak sekolah agar kepuasan orang tua semakin meningkat. Data tersebut dapat dinyatakan pada tabel berikut.

Tabel 6. Persentase data angket Orang Tua terhadap sarana, prasarana dan pengelolaan sekolah

No . Butir soal	Butir Pernyataan	Kete gori	Freku ensi	Persent ase
9.	Kebersihan sekolah	Sang at Puas	28	28%
		Puas	64	64%
		Kura ng Puas	8	8%
		Sang at Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%
No . Butir soal	Butir Pernyataan	Kete gori	Freku ensi	Persent ase
10.	Kemuda han akses menuju sekolah	Sang at Puas	10	10%
		Puas	80	80%
		Kura ng Puas	10	10%
		Sang at Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%
No	Butir	Kete	Freku	Persent

Butir soal	Pernyataan	gori	ensi	ase
11.	Kondisi fisik gedung sekolah	Sangat Puas	4	4%
		Puas	56	56%
		Kurang Puas	40	40%
		Sangat Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%

2. Kepuasan Orang Tua terhadap ketersediaan sarana yang menunjang proses pembelajaran
 Hasil analisis data menunjukkan bahwa indikator kepuasan orang tua terhadap ketersediaan sarana yang menunjang proses pembelajaran dituangkan dalam tiga butir pernyataan menyatakan bahwa: sebagian besar orang tua merasa puas terhadap ketersediaan sarana prasarana yang menunjang proses pembelajaran. Namun demikian terdapat beberapa orang tua yang merasa kurang puas terhadap ketersediaan sarana prasarana yang menunjang proses pembelajaran sebesar 38% dan sangat tidak puas sebesar 3%. Oleh karena itu, hendaknya pihak sekolah dapat

meningkatkan ketersediaan sarana prasarana yang menunjang proses pembelajaran, sehingga kepuasan orang tua semakin meningkat; sebagian besar orang tua merasa puas terhadap kesesuaian fasilitas bermain dengan minat anak. Namun demikian terdapat beberapa orang tua yang merasa kurang puas dengan kesesuaian fasilitas bermain dengan minat anak sebesar 26% dan sangat tidak puas sebesar 3%. Hal ini berarti pihak sekolah hendaknya dapat menyesuaikan kembali fasilitas bermain dengan minat anak; sebagian besar orang tua merasa puas terhadap kelengkapan media pembelajaran. Namun demikian terdapat beberapa orang tua yang merasa kurang puas dengan kelengkapan media pembelajaran sebesar 18%. Hal ini berarti pihak sekolah perlu meningkatkan kelengkapan media pembelajaran. Data tersebut dapat dinyatakan pada tabel berikut.

Tabel 7. Persentase data angket Orang Tua terhadap ketersediaan

sarana yang menunjang proses pembelajaran

No . Butir soal	Butir Pernyataan	Kategori	Frekuensi	Persentase
12 .	Kesesuaian penataan ruang kelas dengan kebutuhan anak	Sangat Puas	4	4%
		Puas	55	55%
		Kurang Puas	38	38%
		Sangat Tidak Puas	3	3%
Total			100	100%
No . Butir soal	Butir Pernyataan	Kategori	Frekuensi	Persentase
13 .	Kesesuaian fasilitas bermain dengan minat anak	Sangat Puas	2	2%
		Puas	69	69%
		Kurang Puas	26	26%
		Sangat Tidak Puas	3	3%
Total			100	100%
No . Butir soal	Butir Pernyataan	Kategori	Frekuensi	Persentase
14 .	Kelengkapan media pembelajaran	Sangat Puas	3	3%
		Puas	79	79%
		Kurang Puas	18	18%
		Sangat Tidak Puas	0	0%

	at Tidak Puas		
Total		100	100%

3. Kepuasan Orang Tua terhadap pengelolaan sarana dan prasarana sekolah

Hasil analisis data menunjukkan bahwa indikator kepuasan orang tua terhadap pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dituangkan dalam tiga butir pernyataan menyatakan bahwa: sebagian besar orang tua merasa puas dengan kejelasan informasi atau layanan administratif. Namun demikian masih terdapat beberapa orang tua yang merasa kurang puas dengan kejelasan informasi atau layanan administratif di SD Negeri Gandekan kecamatan Jebres sebesar 26%. Hal ini berarti pihak sekolah perlu meningkatkan kejelasan informasi atau layanan administratif agar kepuasan orang tua semakin meningkat; sebagian besar orang tua merasa puas dengan keterbukaan sekolah tentang pendanaan untuk kegiatan sekolah. Namun demikian, ada beberapa orang tua yang merasa kurang puas dengan keterbukaan sekolah tentang pendanaan untuk

kegiatan sekolah sebesar 14%. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu meningkatkan keterbukaan tentang pendanaan untuk kegiatan sekolah; sebagian besar orang tua merasa puas dengan cara sekolah melibatkan orang tua dalam program sekolah. Namun demikian masih ada beberapa orang tua yang merasa kurang puas dengan dengan cara sekolah melibatkan orang tua dalam program sekolah sebesar 6%. Hal ini berarti pihak sekolah perlu meningkatkan lagi keterlibatan orang tua dalam program sekolah. Data tersebut dapat dinyatakan pada tabel berikut.

Tabel 8. Persentase data angket Orang Tua terhadap pengelolaan sarana dan prasarana sekolah

No . Bu tir so al	Butir Pernyat aan	Kete gori	Freku ensi	Persen tase
15.	Kejelasa n informa si atau pelayan an administ ratif	Sang at Puas	9	9%
		Puas	65	65%
		Kura ng Puas	26	26%
		Sang at Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%

No . Bu tir so al	Butir Pernyat aan	Kete gori	Freku ensi	Persen tase
16.	Keterbu kaan sekolah tentang pendan aan kegiatan sekolah	Sang at Puas	12	12%
		Puas	74	74%
		Kura ng Puas	14	14%
		Sang at Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%
No . Bu tir so al	Butir Pernyat aan	Kete gori	Freku ensi	Persen tase
17.	Cara sekolah melibatk an orang tua dalam program sekolah	Sang at Puas	19	19%
		Puas	75	75%
		Kura ng Puas	6	6%
		Sang at Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%

C. Kepuasan Orang tua Terhadap Standar Isi, Proses dan Penilaian

Berdasarkan hasil penelitian di SD Negeri Gandekan Kecamatan Jebres menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua menyatakan puas terhadap standar isi, proses dan penilaian. Kepuasan orang tua terhadap standar isi, proses dan penilaian ditinjau dari dimensi *reliability*

(keandalan). Dimensi tersebut memiliki beberapa indikator diantaranya yaitu kepuasan orang tua terhadap terlaksananya kurikulum dalam proses pembelajaran, kepuasan orang tua terhadap penilaian hasil belajar anak, dan kepuasan orang tua terhadap kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan sekolah.

1. Kepuasan Orang Tua terhadap terlaksananya kurikulum dalam proses pembelajaran

Hasil analisis data menunjukkan bahwa indikator pertama ini terdiri dari satu bentuk pernyataan yaitu cara sekolah menampilkan dokumentasi kegiatan sekolah menyatakan bahwa sebagian besar orang tua merasa puas cara sekolah menampilkan dokumentasi kegiatan sekolah. Namun demikian terdapat beberapa orang tua yang merasa kurang puas dengan cara sekolah menampilkan dokumentasi kegiatan sekolah sebesar 21%. Oleh karena itu, sebaiknya pihak sekolah dapat meningkatkan cara sekolah menampilkan dokumentasi kegiatan sekolah.

Tabel 9. Persentase data angket Orang Tua terhadap

terlaksananya kurikulum dalam proses pembelajaran

No . Butir soal	Butir Pernyataan	Kategori	Frekuensi	Persentase
18 .	Terlaksananya kurikulum dalam proses pembelajaran	Sangat Puas	18	18%
		Puas	61	61%
		Kurang Puas	21	21%
		Sangat Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%

2. Kepuasan Orang Tua terhadap penilaian hasil belajar

Hasil analisis data menunjukkan bahwa indikator kedua ini disajikan dalam satu bentuk pernyataan yaitu mengenai cara guru menilai hasil belajar anak menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua merasa puas terhadap hasil belajar anak. Namun ada beberapa orang tua yang merasa kurang puas dengan cara guru menilai hasil belajar anak sebesar 13%. Dengan demikian, indikator kedua yaitu kepuasan orang tua terhadap penilaian hasil belajar anak sebagian orang tua merasa puas yang dapat dilihat dari

pernyataan cara guru menilai hasil belajar anak.

Tabel 10. Persentase data angket Orang Tua terhadap penilaian hasil belajar

No . Butir soal	Butir Pernyataan	Keteg ori	Freku ensi	Persent ase
19.	Penilaian hasil belajar	Sangat Puas	11	11%
		Puas	76	76%
		Kurang Puas	13	13%
		Sangat Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%

3. Kepuasan Orang Tua terhadap kegiatan ekstrakurikuler di sekolah
 Hasil analisis data menunjukkan bahwa indikator ketiga ini disajikan dalam dua pernyataan yaitu pernyataan kesesuaian variasi kegiatan ekstrakurikuler dengan minat anak dan manfaat kegiatan ekstrakurikuler terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak menunjukkan bahwa: sebagian besar orang tua merasa puas terhadap kesesuaian variasi kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan sekolah dengan minat anak. Namun masih ada beberapa orang tua yang

merasa kurang puas sebesar 4%. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu meningkatkan kesesuaian kegiatan ekstrakurikuler dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat anak; sebagian besar orang tua merasa puas terhadap manfaat kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan sekolah. Namun masih ada beberapa orang tua yang merasa kurang puas sebesar 8%. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu meningkatkan manfaat kegiatan ekstrakurikuler dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan anak.

Tabel 11. Persentase data angket Orang Tua terhadap ekstrakurikuler di sekolah

No . Butir soal	Butir Pernyataan	Keteg ori	Freku ensi	Persent ase
20.	Kesesuaian variasi kegiatan ekstrakurikuler	Sangat Puas	21	21%
		Puas	75	75%
		Kurang Puas	4	4%
		Sangat Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%
No .	Butir Pernyataan	Keteg ori	Freku ensi	Persent ase

Butir soal	n			
21.	Penilaian hasil belajar	Sangat Puas	17	17%
		Puas	75	75%
		Kurang Puas	8	8%
		Sangat Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%

D. Kepuasan Orang Tua terhadap tingkat pencapaian perkembangan

Berdasarkan hasil penelitian di SD Negeri Gandekan menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua menyatakan puas terhadap tingkat perkembangan anak. Kepuasan orang tua terhadap tingkat pencapaian perkembangan anak ditinjau dari dimensi *assurance* (kepastian) yang terdiri dari satu indikator yaitu kepuasan orang tua terhadap perkembangan yang dicapai anak yang dapat dilihat dari pernyataan cara sekolah dalam memenuhi kebutuhan gizi (layanan catering sekolah), penambahan kemampuan berbahasa anak, penambahan kemampuan motorik anak, dan penambahan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan teman, membantu teman dan berbagi.

Tabel 12. Persentase data angket Orang Tua terhadap tingkat pencapaian perkembangan

No. Butir soal	Butir Pernyataan	Kategori	Frekuensi	Persentase
21.	Penilaian hasil belajar	Sangat Puas	17	17%
		Puas	75	75%
		Kurang Puas	8	8%
		Sangat Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%

1				
22.	Cara sekolah dalam memenuhi kebutuhan gizi (kantin sekolah)	Sangat Puas	5	5%
		Puas	82	82%
		Kurang Puas	13	13%
		Sangat Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%

No. Butir soal	Butir Pernyataan	Kategori	Frekuensi	Persentase
22.	Cara sekolah memantau kesehatan fisik anak	Sangat Puas	5	5%
		Puas	80	80%
		Kurang Puas	15	15%
		Sangat Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%

No. Butir soal	Butir Pernyataan	Kategori	Frekuensi	Persentase
23.	Penambahan kemampuan berbahasa anak	Sangat Puas	6	6%
		Puas	80	80%
		Kurang Puas	14	14%
		Sangat Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%

No. Butir soal	Butir Pernyataan	Kategori	Frekuensi	Persentase
24.	Penambahan kemampuan	Sangat Puas	11	11%
		Puas	86	86%

	uan motorik anak	Kurang Puas	3	3%
		Sangat Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%
No. Butir soal	Butir Pernyataan	Kategori	Frekuensi	Persentase
25.	Penambahan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan teman, membantu teman dan berbagi	Sangat Puas	14	14%
		Puas	83	83%
		Kurang Puas	3	3%
		Sangat Tidak Puas	0	0%
Total			100	100%

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tingkat kepuasan orang tua terhadap layanan pendidikan di SD Negeri Gandekan Kecamatan Jebres Kota Surakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada aspek kepuasan orang tua terhadap pendidik, berdasarkan akumulasi perolehan skor (rating) tertinggi diperoleh pada aspek cara guru menyambut kedatangan anak dan mendampingi saat penjemputan, adapun skor terendah dicapai pada aspek

cara guru berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak, masing-masing yaitu 3,44 dan 2,98. Selain itu mayoritas orang tua siswa/responden sudah merasa puas dengan layanan pendidik di SD Negeri Gandekan.

2. Pada aspek kepuasan orang tua terhadap sarana, prasarana dan pengelolaan. Berdasarkan akumulasi perolehan skor (rating) tertinggi diperoleh pada aspek cara sekolah melibatkan orang tua dalam program sekolah, adapun skor terendah dicapai ada aspek kesesuaian penataan ruang kelas dengan kebutuhan anak. Masing-masing yaitu 3,13 dan 2,6. Dalam hal ini, mayoritas orang tua siswa /responden puas dengan layanan sarana, prasarana, dan pengelolaan di SD Negeri Gandekan.
3. Pada aspek kepuasan orang tua terhadap standar isi, proses dan penilaian. Berdasarkan akumulasi perolehan skor (rating) tertinggi diperoleh pada aspek kesesuaian variasi kegiatan ekstrakurikuler dengan minat anak, adapun skor terendah dicapai pada aspek cara sekolah menampilkan dokumentasi kegiatan sekolah, masing-masing yaitu 3,17 dan 2,77. Dalam hal ini, mayoritas orang tua siswa/responden

merasa puas dengan layanan standar isi, proses dan penilaian di SD Negeri Gandekan.

Pada aspek kepuasan orang tua terhadap tingkat pencapaian perkembangan. Berdasarkan akumulasi perolehan skor (rating) tertinggi diperoleh pada aspek penambahan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan teman, membantu teman dan berbagi, adapun skor terendah dicapai pada aspek cara sekolah dalam memantau kesehatan pertumbuhan fisik anak, masing-masing yaitu 3,11 dan 2,9. Selain itu mayoritas orang tua/responden merasa puas dengan layanan tingkat pencapaian perkembangan di SD Negeri Gandekan

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasih dan Kusuma, Indra Wijaya. (2011). *"Manajemen Laba pada Saat Pergantian CEO di Indonesia"*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 13. 2, 67-79.
- Agbor, Janet Manyi. (2011). *The Relationship Between Customer Satisfaction And Service Quality: A Study Of Three Service Sectors In Umea*. Umea School of Business.
- Agung. Purwoko. (2001). *Panduan Penelitian PTK*. Semarang : Unnes Press.
- Arcaro, J.A. (1995). *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azwar. Saifuddin. (2013). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida Jasfar. (2009). *Manajemen Jasa*. Indonesia: Ghalia.
- Hadari, Nawawi. (2005). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handi Irawan. (2009). *10 Prinsip Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hasbullah. (2005). *Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta. Penerbit: PT RajaGrasindo Persada.Ahmadi.
- J. Supranto. (2006). *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan : Untuk Menaikkan Pangsa Pasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kotler, Philip. (2005). *Manajemen Pemasaran, Jilid I, Edisi Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1976). *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Sugiyono. (2009). *Statistika untuk Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Mewujudkan Kultur Sekolah Melalui Kepemimpinan Kepala Sekolah di Sekolah Dasar

Ariskha Lianasari Fajarwati

Prodi S2 PGSD Pascasarjana UNS

Email: Ariskhalianasari@student.uns.ac.id

ABSTRACT. *This article describes the role of the principal in creating cultures of primary school. The purpose of this study was to determine the principal's leadership in promoting and developing the school culture, especially in primary schools. This research use descriptive qualitative approach. This research was conducted in SD Negeri 1 Miri Geneng Sragen. Subjects in this study was the principal. Data collection techniques in this study using observation and interviews. Data were analyzed using an interactive model that consists of three stages: the reduction of the data (data reduction), presentation of data (display data), and conclusion (verification). Based on these results it can be concluded that through the leadership of the principal to realize the culture of the school in SD Negeri 1 Miri Sragen Geneng can be said to have been effective, although the results have not been up. This can be evidenced by an increase in primary school culture through strategic and cultural characteristics of schools built by the principals in primary schools Geneng 1.*

Keywords: *school leadership, school culture.*

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan tempat kegiatan belajar mengajar. Belajar dan mengajar tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan transfer ilmu pengetahuan dari guru ke siswa. Berbagai kegiatan seperti bagaimana membiasakan seluruh warga sekolah disiplin dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di sekolah, saling memiliki

semangat kompetisi dan sejenisnya merupakan kebiasaan yang harus ditumbuhkan di lingkungan sekolah. Semua kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik berkat adanya kepemimpinan kepala sekolah.

Kepala sekolah merupakan seorang tenaga fungsional guru yang bertugas memimpin suatu sekolah di mana

diselenggarakannya proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Oleh karena itu, kepala sekolah dikatakan sebagai pemimpin di satuan pendidikan yang bertugas menjalankan manajemen satuan pendidikan yang dipimpin. Kepala sekolah yang baik adalah yang mampu mengelola program dan tujuan sekolah dengan baik, visi dan misi, serta strategi manajemen pendidikan yang utuh dan berpusat kepada mutu, semua dapat terlaksana jika terdapat kerjasama semua warga sekolah (stakeholder) (Mulyasa, 2013: 25).

Menurut Kurnia dan Bambang Qomaruzzaman (2012: 24) budaya sekolah merupakan jaringan kompleks dari berbagai interaksi aktor dalam sekolah yang diaplikasikan dalam tradisi dan ritual yang dibangun di antara guru, murid, orang tua, serta administrator untuk menghadapi berbagai tantangan dan mencapai tujuan. Hal ini senada dengan pendapat Kamile Demir dalam jurnal internasional yang mengemukakan bahwa "School culture is one of the most important and complex aspects of education." Budaya sekolah dimaknai seperti bagaimana seseorang berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang telah ada serta mencerminkan tujuan dari sekolah itu sendiri. Setiap sekolah memiliki budaya berbeda-beda meliputi aturan moral, ritual dan berbagai bentuk hubungan

antar aktor yang berada di dalamnya. Perubahan positif di sekolah akan terjadi jika seluruh subjek sekolah memahami sifat budaya sekolahnya sendiri dengan baik, baik yang tampak maupun tidak tampak atau yang formal maupun informal, selain itu perlu adanya kerjasama dari semua warga sekolah.

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti diungkapkan Supriadi (Mulyasa, 2013: 25) bahwa : "Erat hubungannya antara mutu kepala sekolah dengan berbagai aspek kehidupan sekolah seperti disiplin sekolah, iklim budaya sekolah, dan menurunnya perilaku nakal peserta didik". Kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara mikro, yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Feng-Feng dalam jurnal internasional yang menyebutkan bahwa, "Principals, therefore, play an important role in practicing authentic leadership to sustain teachers' psychological capital regardless of the context, although this article shows that authentic school leadership needs to be understood and interpreted within particular cultural contexts."

Dalam observasi dan wawancara ditemukan hasil bahwa kepemimpinan kepala sekolah di SD Negeri Geneng 1

sudah berjalan cukup baik, kepala sekolah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, kepala sekolah konsisten dalam keputusan yang diambil, bijaksana, serta sudah melaksanakan strategi yang ditetapkan oleh kepala sekolah dalam mewujudkan kultur sekolah seperti yang diharapkan. Kepala sekolah dalam peran sebagai inovator telah melakukan inovasi baru dalam kepemimpinannya, yaitu pembentukan pendidikan karakter bagi warga sekolah selain dalam pembentukan kultur sekolah.

Kultur sekolah di SD Negeri Geneng 1 terdiri dari berbagai macam, berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal dimulai sebelum pembelajaran dimulai tampak budaya disiplin di SD Negeri Geneng 1 berjalan cukup baik di mana sebelum pukul 06.30 peserta didik dan guru sudah berada di sekolah untuk budaya salaman pagi kemudian dilanjutkan dengan budaya nasionalisme dan keagamaan, kultur kerapian, ketertiban dan keindahan tampak pada ruang kelas dan sekolah di mana semua tertata rapi, indah dan nyaman serta peserta didik dan guru tertib dalam pelaksanaan proses KBM. Selain itu, kultur sekolah juga tampak pada kondisi fisik sekolah berupa kultur kebersihan, keindahan, kerapian dan kerindangan sekolah. Slogan-slogan ditata rapi di sudut kelas dan sekolah, pohon rindang, pot-pot ditata dan digantung dengan rapi, hasil

prestasi dan karya peserta didik dipajang di dinding kelas sehingga semua dapat melihat.

Namun masih terdapat beberapa kekurangan khususnya dalam mewujudkan kultur sekolah, misalnya dalam kedisiplinan, masih ditemukan beberapa peserta didik dan guru yang datang terlambat, belum terlaksananya semua budaya sekolah oleh warga sekolah dengan konsisten, masih ada peserta didik yang belum memakai atribut sekolah (seragam sekolah) dengan lengkap serta konsep pengembangan budaya sekolah yang belum dipahami seutuhnya oleh warga sekolah, khususnya peserta didik. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berhubungan dengan pribadi dan sikap dari peserta didik itu sendiri, sedangkan faktor eksternal dapat berhubungan dengan lingkungan sekitar/masyarakat, khususnya lingkungan keluarga.

Dengan demikian, upaya mewujudkan kultur sekolah dapat dilakukan melalui revitalisasi peran kepala sekolah yaitu kegiatan yang harus dilakukan kepala sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah yang profesional. Dengan revitalisasi kepala sekolah diharapkan adanya peningkatan mutu pendidikan nasional terutama dalam mewujudkan kultur sekolah yang berkualitas. Serta kegiatan pendidikan

mampu membekali peserta didik dalam menghadapi tantangan hidupnya di masa depan, harus diantisipasi berdasarkan kecenderungan-kecenderungan yang ada, apa yang menjadi tantangan hidup mereka di masa depan, oleh sebab itu kepala sekolah harus berpandangan luas dan mengikuti perkembangan di masyarakat, khususnya perkembangan budaya.

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan sekolah yang termuat pada visi, misi, tujuan dan sasaran program sekolah, maka para kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh agar mampu mengambil keputusan dan prakarsa serta bekerjasama dengan seluruh warga sekolah untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud mengangkat dalam bentuk judul penelitian "Mewujudkan Kultur Sekolah Melalui Kepemimpinan Kepala Sekolah di Sekolah Dasar"

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Penelitian deskriptif dapat berkenaan dengan kasus-kasus tertentu atau suatu populasi yang cukup luas. Dapat dilakukan pada saat ini atau

dalam kurun waktu yang singkat, serta dapat dilakukan dalam waktu yang cukup lama (Sukmadinata, 2013: 18)

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Geneng 1 Miri Sragen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi dan karakteristik kultur sekolah yang dibangun oleh kepala sekolah di SD Negeri Geneng 1 Miri Sragen. Subjek pada penelitian ini adalah kepala sekolah.

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan kepala sekolah, guru dan siswa. Sumber data sekunder berupa arsip-arsip sekolah mengenai kepemimpinan kepala sekolah, kultur sekolah dan data lainnya. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi dan wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis data ini adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Model analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan (*verification*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerja sama ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Daryanto, 2013: 94). Selain itu,

Kartono (Karwati dan Donni Juni Priansa, 2013: 163) berpendapat bahwa pemimpin adalah seseorang yang mempunyai superioritas tertentu sehingga memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan usaha bersama dalam mencapai tujuan tertentu. Pemimpin adalah orang yang paling berperan, di mana hasil diperoleh jika pemimpin mengetahui apa yang diinginkan.

Kepemimpinan kepala sekolah adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan dan mengkoordinir orang lain dalam pengembangan ilmu pendidikan, pelaksanaan dan pengajaran agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan (Khomariyah, 2015: 3). Suhardiman (2012: 31) menjelaskan kepemimpinan kepala sekolah hakikatnya adalah kepala sekolah yang menguasai dan memahami kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang efektif berupa EMASLIM (*educator*, manajer, administrator, supervisor, *leader*, inovator, dan motivator).

Macam kepemimpinan adalah Kepemimpinan Demokratis, Kepemimpinan Otokratis, dan Kepemimpinan *Laissez Faire*. Pola perilaku kepemimpinan kepala sekolah diantaranya, perilaku Konsultatif, perilaku Instruktif, perilaku Delegatif, dan perilaku

Partisipatif. (Karwati dan Donni Juni Priansa, 2013: 178-179).

Kepemimpinan kepala sekolah di SD Negeri Geneng 1 termasuk ke dalam kepemimpinan Demokratis, karena kepala sekolah tidak bertindak sebagai penguasa, antara kepala sekolah dan guru mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan tugas masing-masing, terbuka terhadap kritik dan saran dari semua warga sekolah, orang tua, komite dan *stakeholder* lainnya. Selain itu, kepemimpinan kepala sekolah SD Negeri Geneng 1 termasuk ke dalam pola Partisipatif, kepala sekolah dan bawahan saling bekerjasama demi peningkatan mutu sekolah agar sesuai visi misi dan tujuan sekolah yang diharapkan, selalu melakukan komunikasi dua arah dalam mengkomunikasikan informasi maupun menyelesaikan masalah guna mendapat keputusan bersama.

Kultur/budaya sekolah yaitu suatu tindakan dan norma perilaku yang terjadi pada setiap anggota yang menjadi ciri khas sekolah, membentuk jaringan berdasarkan kebiasaan atau nilai-nilai yang sudah ada, bertahan lama serta mencerminkan tujuan dari sekolah tersebut dan dapat dipahami melalui elemen-elemennya.

Kultur Sekolah di SD Negeri Geneng 1 tercermin dari berbagai macam bentuk dan implikasi. Kegiatan dimulai dari sebelum memulai kegiatan belajar mengajar (KBM) hingga

pelajaran selesai serta ketika pulang sekolah. Semua kegiatan merupakan program dari kepala sekolah dan sekolah itu sendiri. Kultur sekolah tersebut terdiri dari salaman, tegur, senyum dan sapa di pagi hari ketika memasuki gerbang sekolah, nasionalisme (hormat bendera, menyanyikan lagu nasional) serta keagamaan (tadarus, hafalan surat), budaya kebersihan, kerapian sekolah dan peserta didik, kedisiplinan, suasana dan kegiatan agamis (sholat dhuha, dzuhul berjamaah, kegiatan membaca di perpustakaan, memilah dan membuang sampah sesuai dengan jenis sampah, terdapat bank sampah, slogan-slogan di setiap sudut kelas dan sekolah. Selain itu, di SD Negeri Geneng 1 menerapkan budaya agamis bagi yang beragama Islam, dengan berbagai kegiatan keagamaan, sedangkan warga sekolah yang beragama nonmuslim menyesuaikan. Kepala sekolah juga membiasakan semua warga sekolah, khususnya peserta didik untuk saling menghargai satu sama lain, di sekolah guru berperan sebagai orang tua, peserta didik pun sudah terbiasa dengan kondisi kelas dan sekolah yang membiasakan hal tersebut, sehingga peserta didik tidak canggung dan lebih nyaman dalam menerima pembelajaran serta melaksanakan segala kegiatan sekolah.

Pembahasan

1. Karakteristik Kepemimpinan Kepala Sekolah di SD Negeri Geneng 1

- a. Pengetahuan Sekolah Kepemimpinan Sekolah Kepala Mengenai Kepala Sekolah

Pengetahuan kepala sekolah SD Negeri Geneng 1 mengenai kepemimpinan adalah sebagai *leader*/dituakan, mempunyai pribadi yang kuat, memberdayakan seluruh warga sekolah, dapat mengawal visi dan misi sekolah, mengambil keputusan yang tepat dan mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi. Kepala sekolah mampu memberdayakan, menggerakkan dan mengkoordinir orang lain dalam pengembangan ilmu pendidikan agar dapat berjalan sesuai dengan visi dan misionis sekolah serta tujuan sekolah. Dalam menjalankan tugasnya kepala sekolah sangat menguasai dan mumpuni dalam melaksanakan kepemimpinan yang efektif berupa EMASLIM untuk kemajuan dirinya sendiri, warga sekolah maupun kualitas sekolah.

- b. Kepemimpinan Sekolah Kepala Sekolah

Kepala sekolah mempunyai kepemimpinan yang tegas, disiplin, terbuka serta bijaksana dalam kepemimpinannya. Selain itu, dapat menyesuaikan dengan SD Negeri Geneng 1 selama beliau menjabat dengan aturan/budaya kepala sekolah sebelumnya.

- c. Tugas dan Wewenang

Dalam mengendalikan kegiatan sekolah, kepala sekolah melakukan pengontrolan terhadap kegiatan senam, sholat, upacara bendera dan kegiatan belajar mengajar, serta dibantu oleh bapak/ibu guru. Kepala sekolah sebagai administrator, bertugas mengelola administrasi, kesiswaan, keuangan, KBM dan BK, ketenagaan, sarana dan prasarana, persuratan dan urusan rumah tangga. Sebagai supervisor, kepala sekolah bertugas memanfaatkan hasil supervisi, menyusun program supervisi pendidikan. Sebagai *leader*, kepala sekolah bertugas menyusun dan mensosialisasikan visi dan misi program sekolah, mengambil keputusan serta melakukan komunikasi. Kepala sekolah sebagai *inovator*, membentuk dan menciptakan inovasi/pembaruan serta ide-ide baru untuk kemajuan sekolah agar tujuan sekolah tercapai, bertugas mendorong guru, staf dan orang tua untuk memahami dan memberikan dukungan terhadap pembaruan yang ditawarkan, serta mencari dan melakukan pembaharuan dalam segala aspek. Kepala sekolah SD Negeri Geneng 1 telah melakukan inovasi baru dalam hal penekanan pendidikan karakter bagi warga sekolah guna mendapat kualitas sekolah yang baik sehingga kultur sekolah dapat dilaksanakan dengan baik pula, untuk mempermudah hal tersebut kepala sekolah melakukan pertemuan rutin dengan orang tua peserta didik

dan *stakeholder*. Kepala sekolah sebagai pembangkit minat (*motivator*), bertugas membangkitkan minat warga sekolah untuk selalu mentaati dan melaksanakan aturan sekolah agar sesuai visi dan misi. Dalam membuat suasana dan lingkungan kerja menjadi lebih dekat maka kepala sekolah dan warga sekolah menciptakan suasana kekeluargaan serta sikap saling menghargai satu sama lain, membangun prinsip penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) yang sistemik. Dalam hal pemberian *punishment* kepala sekolah bertindak dengan tegas warga sekolah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, contohnya dalam kedisiplinan, terdapat catatan peserta didik yang dipegang bapak/ibu guru serta kartu karakter sedangkan untuk guru terdapat buku catatan yang dipegang oleh kepala sekolah guna mencatat kinerja guru yang telah dilaksanakan.

d. Kebijakan Kepala Sekolah

Kebijakan kepala sekolah yang diambil merupakan hasil musyawarah maupun masukan dari warga sekolah/wali murid. Kepala sekolah selalu memantau kinerja guru melalui buku catatan. Pola perilaku kepemimpinan kepala sekolah SD Negeri Geneng 1 tersebut merupakan perilaku Partisipatif, di mana kepala sekolah dengan guru dan staf bersama-sama memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Memiliki

gaya kepemimpinan yang demokratis, lugas dan terbuka. Kebijakan kepala sekolah menindak lanjut warga sekolah melalui buku catatan serta kartu karakter. Kepala sekolah dalam rapat rutin juga membuka hak berpendapat kepada seluruh guru dan staf guna membahas dan menyelesaikan suatu permasalahan sehingga tercapai mufakat. Kepala sekolah bertindak sebagai pengarah, evaluasi, mengontrol serta mengkoordinasi tugas yang diemban oleh guru, staf dan pegawai. Pernyataan tersebut tampak ketika kepala sekolah SD Negeri Geneng 1 menunjuk guru untuk membimbing dan melatih dalam persiapan lomba yang akan diikuti, di mana kepala sekolah membebaskan guru untuk melakukan tugasnya namun tetap dengan kendali dan pengawasan kepala sekolah, selain itu dengan kegiatan tersebut kepala sekolah sekaligus dapat mengevaluasi kinerja dari guru untuk diambil tindak lanjut.

e. Kedisiplinan Kepala Sekolah

Dalam hal kedisiplinan, kepala sekolah SD Negeri Geneng 1 selalu datang tepat waktu bahkan hampir setiap hari selalu datang lebih awal dibandingkan guru ataupun peserta didik, dan ketika sholat berjamaah, kepala sekolah ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini kepala sekolah bertindak sebagai model serta suri tauladan bagi peserta didik dan warga sekolah lainnya. Kepala sekolah SD Negeri Geneng

1 menetapkan jam masuk untuk kegiatan rutin pra-KBM pukul 06.45 sehingga para guru, staf dan peserta didik harus mematuhi dan melaksanakan peraturan tersebut. Begitu pula dalam proses KBM, guru jika tidak ada kepentingan yang mendesak tidak diperbolehkan ijin dan meninggalkan kelas.

f. Evaluasi Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja Bawahan

Kepala sekolah SD Geneng 1 selalu melakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam kepemimpinannya dengan pertemuan setiap akhir bulan. Dalam evaluasi tersebut selain bertujuan mengevaluasi kepemimpinan kepala sekolah juga bertujuan membuka kritik dan saran dari warga sekolah (aspirasi warga sekolah)/wali murid melalui perantara guru untuk kemajuan kepemimpinan maupun sekolah serta untuk memecahkan masalah dengan musyawarah. Sehubungan dengan hal tersebut juga berfungsi untuk melaporkan semua hasil laporan, baik keuangan, kesiswaan, laporan perpustakaan, bank sampah, dan urusan administrasi lainnya. Semua laporan dan hasil ditampung kemudian dilakukan evaluasi serta tindak lanjut untuk menangani masalah dan hasil tersebut, termasuk di dalamnya kritik dan saran yang membangun demi kemajuan sekolah, baik warga sekolah SD Negeri Geneng 1 itu sendiri.

g. Hubungan dan Pembagian Tugas dengan Bawahan

Dalam menjalankan tugasnya kepala sekolah selalu membagi tugas dengan guru-guru, saling bekerjasama untuk tujuan yang sama. Dalam observasi ditemukan bahwa sekolah sedang mengikuti berbagai perlombaan, diantaranya bidang olah raga, kesenian jawa (geburan, bercerita cerita jawa), cerdas cermat, dan lain-lain, dalam mempersiapkan hal tersebut kepala sekolah menunjuk beberapa guru sebagai pamong dari masing-masing bidang untuk melatih peserta didik. Kepala sekolah dan guru saling membangun nuansa kerja yang kekeluargaan, walaupun demikian kerjasama utamanya dalam kinerja tetap menjadi prioritas, guru-guru pun menyadari untuk aktif, kreatif dan produktif.

h. Tindakan Kepala Sekolah Jika Terdapat Permasalahan di Sekolah

Kepala sekolah dalam mengatasi suatu masalah dengan segera melakukan rapat/musyawarah dengan bapak/ibu guru, tergantung dari permasalahan tersebut. Kepala sekolah menyelesaikan masalah berdasarkan informasi yang sesuai dengan fakta serta mencari tahu melalui orang lain kejelasan informasi tersebut, yang kemudian melakukan musyawarah baik hanya dengan kelompok guru yang berurusan saja maupun semua guru/warga sekolah tergantung dari

permasalahan itu sendiri. Dalam musyawarah dan mengambil keputusan dari suatu masalah kepala sekolah selalu terbuka dalam menyelesaikan permasalahan dengan guru, guru pun bebas berpendapat sehingga cepat dalam mengambil keputusan dan cepat pula permasalahan dapat terselesaikan. Berdasarkan hal tersebut maka kepala sekolah SD Negeri Geneng 1 mempunyai sifat terbuka, adil, bijaksana, tegas, dan cerdas.

i. Hubungan Kepala Sekolah dengan Warga Sekolah dan *Stakeholder*

Hubungan kepala sekolah dengan warga sekolah di SD Negeri Geneng 1 dapat dikatakan sangat harmonis, dekat dan hangat serta kekeluargaan. Kepala sekolah tidak segan untuk bertanya dan menyapa warga sekolah, baik berupa kesulitan belajar/mengajar, urusan sekolah maupun hal-hal lainnya. Upaya kepala sekolah dalam menjalin hubungan baik dengan masyarakat sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat adalah dengan bekerjasama antara sekolah, komite dan mitra kerja, kepala desa/perangkat desa yang lainnya (*stakeholder*). Bentuk kerjasama kepala sekolah dengan *stakeholder* dalam mewujudkan kultur sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah adalah saling memberikan masukan, salah satunya adalah komite sekolah.

j. Konsistensi Kepala Sekolah terhadap Visi dan Misi

serta dalam Pengambilan Keputusan

Kepala sekolah di SD Negeri Geneng 1 merupakan kepala sekolah yang komit terhadap keputusan yang diambilnya. Memperhatikan etos kerja dan nama sekolah yang diampunya, oleh karena itu kepala sekolah konsisten dalam melaksanakan visi dan misi kepalanya serta visi dan misi sekolah beserta tujuan-tujuannya. Tampak ketika kepala sekolah SD Negeri 1 Papahan memutuskan untuk menunjuk guru untuk memilih peserta didik yang berkompetensi dan membimbing lomba. Serta dalam mengambil keputusan dalam materi lomba yang akan dibimbing oleh guru kepada peserta didik. Dalam hal konsistensi dalam kinerjanya, kepala sekolah juga dapat berperan sebagai model untuk semua warga sekolah, khususnya guru dan staf.

2. Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Kultur Sekolah di SD Negeri 1 Papahan Tasikmadu Karanganyar

a. Pengetahuan Kepala Sekolah Mengenai Kultur Sekolah

Menurut kepala sekolah SD Negeri Geneng 1 kultur sekolah adalah tempat mengolah, membudayakan dan mendidik peserta didik untuk sekolah dasar mempunyai bekal pendidikan awal/ pendidikan dasar. Kepala

sekolah sebagai *leader* harus benar-benar menjadi suri tauladan dan contoh pada bawahan terutama bagi peserta didik.

b. Strategi

Strategi yang digunakan dan dilaksanakan antara lain: memberdayakan semua warga sekolah, dimulai dari kegiatan awal sebelum proses KBM hingga KBM usai, dibiasakan salaman pagi, diharapkan menghormati bapak/ibu guru dan orang tua di rumah, di lingkungan masyarakat dapat menghormati orang lain, setelah anak-anak masuk, dilaksanakan pendidikan nasional (hormat bendera, menyanyikan lagu nasional) dan keagamaan (tadarus dan hafalan surat pendek) serta berdoa sebelum dan sesudah KBM berlangsung. SD Negeri Geneng 1 merupakan SD Negeri, namun dalam pelaksanaannya mengutamakan budaya keagamaan/Islami.

c. Program Khusus

Program khusus yang dilakukan kepala sekolah dan bapak/ibu guru dalam mewujudkan kultur sekolah adalah memberi bimbingan ekstrakurikuler hari Sabtu yaitu pembimbingan untuk keagamaan, terdiri dari muslim dan nonmuslim selain ekstrakurikuler tersebut masih banyak ekstrakurikuler lainnya yang dapat diikuti oleh peserta didik. Kegiatan dalam membiasakan seluruh warga sekolah terutama peserta didik untuk mengedepankan pendidikan karakter.

d. Pengawasan/Pemantauan

Cara kepala sekolah dan bapak/ibu guru dalam memantau perkembangan kultur sekolah pada peserta didik seperti yang diutarakan oleh kepala sekolah adalah dengan melakukan pengawasan, buku pemantauan dan catatan bagi anak-anak, di mana disetiap akhir/periodesasinya akan dihitung poinnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil pengamatan, kepala sekolah mengontrol setiap kegiatan sekolah.

e. Peran Visi dan Misi Kepala Sekolah

Peran visi dan misi sangatlah penting dalam usaha mewujudkan kultur sekolah yang sesuai dengan tujuan sekolah, diadakan evaluasi 1 bulan sekali (setiap Jumat minggu terakhir), salah satunya untuk mengawal dan melihat perkembangan visi dan misi sekolah, harapan kepala sekolah semua dapat terwujud dan berhasil. Hal tersebut telah dilakukan oleh kepala sekolah dalam menerapkan dan mengembangkan budaya sekolah yang baik. Terbukti dengan budaya sekolah yang sudah rutin dilakukan dan menjadi kebiasaan, misal dalam salaman pagi, nasionalisme, keagamaan, dan lain lain.

f. Penanaman Kesadaran terhadap Kultur Sekolah

Cara menanamkan dan menumbuhkan kesadaran akan pengembangan budaya sekolah terhadap guru dan staf serta peserta didik adalah dengan

setiap hari membiasakan untuk bersalaman, antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, termasuk ketika pulang sekolah, selain itu kepala sekolah membiasakannya melalui kegiatan upacara, di amanat pembina upacara kepala sekolah selalu mengingatkan untuk tetap melaksanakan kultur sekolah dan tetap melaksanakan tata tertib sekolah.

g. Tindakan yang Sudah Kepala Sekolah Lakukan dalam Mewujudkan Kultur Sekolah

Tindakan kepala sekolah terhadap kultur sekolah adalah selalu memberikan pemantauan, memberikan masukan kepada bapak ibu guru dan warga sekolah tentang pengembangan kultur sekolah. Mencanangkan perubahan tata tertib, pembentukan slogan-slogan di setiap sudut kelas maupun luar kelas, penanaman tanaman di pot-pot besar, budaya disiplin setiap hari, melakukan pertemuan seperti yang telah dijelaskan setiap Jumat minggu terakhir setiap bulannya, yang berisi laporan-laporan, evaluasi dan tindak lanjut. Kultur sekolah yang dituntut dalam pengelolaan sekolah yang efektif adalah persamaan sikap, pola pikir, persepsi, bertindak dan berkarya..

Hal tersebut sesuai dengan indikator budaya sekolah yang baik adalah penampilan fisik sekolah (bersih, rapi, nyaman dan aman), fasilitas sekolah dirawat dengan baik, poster-poster

afirmasi (berisi pesan positif) dipajang dan digunakan di berbagai tempat strategis yang selalu dan mudah dilihat oleh warga sekolah, kondisi kelas menyenangkan, sekolah menciptakan rasa memiliki, sehingga warga sekolah menunjukkan rasa bangga terhadap sekolahnya, guru bersedia untuk mengubah metode mengajar jika terdapat metode yang lebih baik, serta terdapat peralihan/transisi yang cepat dan lancar antar kegiatan di kelas/sekolah.

h. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Kultur Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh hasil mengenai keberhasilan kepala sekolah dalam mewujudkan kultur sekolah dengan kartu karakter siswa yang terbukti sedikit melanggar tata tertib sekolah dan budaya sekolah. Program sekolah dilaksanakan dengan baik oleh semua warga sekolah dan selalu dipantau serta dievaluasi kepala sekolah.

i. Inovasi Baru Kepala Sekolah

Kepala sekolah di SD Negeri Geneng 1 selalu mempunyai inovasi baru terhadap kepemimpinan dan kinerjanya, yang merupakan strategi dalam memajukan sekolah agar mendapat kepercayaan dari masyarakat dan dapat bersaing dengan sekolah unggulan lainnya. Inovasi baru tersebut adalah kepala sekolah dan seluruh warga

sekolah untuk tetap mempertahankan dan memberdayakan hal-hal yang positif, untuk hasil yang dahulunya belum optimal sekarang sudah lebih baik. Mempertahankan budaya positif. Sebelumnya guru belum maksimal dalam tugasnya sekarang sudah lebih baik. Selain itu adanya pendidikan karakter yang dikembangkan dan dievaluasi melalui kartu karakter.

3. Karakteristik Kultur Sekolah yang Dibangun oleh Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Papahan Tasikmadu Karanganyar

a. Nilai, Norma, Keyakinan dan Kebiasaan

- 1) Melaksanakan kegiatan salaman pagi, kegiatan nasionalisme dan tadarus sebelum proses kegiatan belajar mengajar
- 2) Melaksanakan kegiatan sholat dhuha dan dzuhur
- 3) Memakai seragam dan atribut sesuai peraturan
- 4) Selalu menjaga kebersihan lingkungan
- 5) Menjaga kerapian dan kerindangan sekolah
- 6) Membudayakan ketertiban dan keamanan
- 7) Menjaga kedisiplinan
- 8) Selalu berperilaku jujur
- 9) Membudayakan sikap nasionalisme
- 10) Meningkatkan budaya membaca

- 11) Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler penunjang kultur sekolah
- 12) Nilai-nilai kultur/budaya yang dikembangkan di SD Negeri Geneng 1
Nilai-nilai budaya yang dikembangkan selain budaya yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat beberapa nilai lain antara lain: nilai-nilai yang mengedepankan pendidikan karakter, terangkum ada 18 karakter dalam mewujudkan budaya sekolah antara lain religius, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab.
- 13) Mengutamakan budaya/kultur positif dalam proses pembelajaran
- 14) Meningkatkan kegiatan agamis dalam akademik
- 15) Mengadakan program belajar di luar kelas
- 16) Mengadakan lomba yang mendukung kultur sekolah
- 17) Mentaati Tata Tertib dan Visi Misi Sekolah
- 18) Menerima sanksi jika melanggar aturan yang sesuai dengan budaya sekolah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kepemimpinan, peran kepala sekolah sudah sesuai dengan indikator kepala sekolah yang efektif. Kepemimpinan kepala sekolah termasuk ke dalam kepemimpinan yang demokratis,, sedangkan dalam perilaku digolongkan dalam perilaku Partisipatif. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang konsisten terhadap visi dan misi serta kenerjanya sebagai kewajiban dari etos kerjanya.

Strategi kepala sekolah dalam mewujudkan kultur sekolah sudah cukup baik. Strategi tersebut berupa memberdayakan semua warga sekolah, dimulai dari kegiatan awal sebelum proses KBM hingga KBM usai, dibiasakan salaman pagi, diharapkan menghormati bapak/ibu guru dan orang tua di rumah, di lingkungan masyarakat dapat menghormati orang lain, setelah anak-anak masuk, dilaksanakan pendidikan nasional (hormat bendera, menyanyikan lagu nasional) dan menekankan kegiatan keagamaan serta berdoa sebelum dan sesudah KBM berlangsung. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan visi dan misi sekolah, membiasakan seluruh warga sekolah terutama peserta didik

untuk mengedepankan pendidikan karakter.

DAFTAR PUSTAKA

- Barlian, Ikbal. 2013. *Manajemen Berbasis Sekolah Menuju Sekolah Berprestasi*. Jakarta: Erlangga
- Hasnun, Anwar. 2010. *Mengembangkan Sekolah Efektif*. Yogyakarta: Datamedia.
- Daryanto. 2011. *Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran*. Yogyakarta: Gava Media.
- Demir, Kamile. 2013. *The Effect of Organizational Trust on the Culture of Teacher Leadership in Primary Schools*. Mehmet Akif Ersoy University.
- Feng-Feng. 2016. *School Principals' Authentic Leadership and Teachers' Psychological Capital: Teachers' Perspectives*. Department of Educational Policy and Administration, National Chi Nan University, Taiwan.
- Karnadi. 2005. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Sekolah Menengah Umum)*. Jakarta: Cipta Jaya.
- Karwati, Euis dan Donni Juni Priansa. 2013. *Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah Membangun Sekolah yang Bermutu*. Bandung: Alfabeta.
- Khomariyah, Eni Nurul. 2015. "Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SD Negeri Kudu 01 Baki Sukoharjo. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kurnia, Adi dan Bambang Qomaruzzaman. 2012. *Membangun Budaya Sekolah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mulyasa. 2013. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nurkolis. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Suhardiman, Budi. 2012. *Studi Pengembangan Kepala Sekolah Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sukmadinata, S Nana. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Media Rosdakarya.

PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*) UNTUK MENGATASI MASALAH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH SURAKARTA TAHUN 2016

Dwi Cahaya Nurani

Prodi S2 PGSD Pascasarjana UNS

Email: Dwicahayanurani@student.uns.ac.id

Abstract : *This article describes the role of remission of taxes (tax amnesty) in addressing tax compliance. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the tax amnesty program (tax amnesty) to address tax compliance, especially in the area of Surakarta 2016. This research use descriptive qualitative approach. This research was conducted at the Tax Office Primary Surakarta. Subjects in this study were assessable in Surakarta, divided into 5 districts and 51 villages. Data collection techniques in this study using the interview and library research (literature study). Data were analyzed using an interactive model that consists of three stages: the reduction of the data (data reduction), presentation of data (display data), and conclusion (verification). Based on these results it can be concluded that the tax amnesty program or (tax amnesty) to overcome the problem of tax compliance in Surakarta in 2016 can be said to have been effective, although the results have not been up. This can be evidenced by an increase in reporting of property taxpayers to STO Surakarta despite these improvements have not reached the expected target in this period, with a target increase of 44 percent, or Rp. 1.9 trillion rupiah.*

Keywords: *Forgiveness Tax (Tax Amnesty), tax compliance*

PENDAHULUAN

Proses administrasi perpajakan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan Menteri Keuangan.

Program pengampunan pajak (tax amnesty) merupakan

salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memberi pengampunan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran di masa lalu. Hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bersama tim yang telah dibentuk

dengan melibatkan kementerian hukum dan perundang-undangan, pihak kepolisian dan pihak yang berkompeten. Tujuan dari dilaksanakannya program ini adalah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak atau Pembayar Pajak untuk nantinya mereka membayar pajak sesuai objek pajak yang dimiliki, tidak memanipulasi pajak, tidak menunggak pajak, dan mempunyai iktikad baik dan benar untuk membayar pajaknya.

Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengampunan terhadap Wajib Pajak atau Pembayar Pajak masih diwarnai dengan pro dan kontra dari berbagai pihak. Program tax amnesty pernah dilaksanakan dua kali yaitu ditahun 1984 dan 2008. Pelaksanaan *tax amnesty* di tahun 1984 merupakan kegagalan bagi program tersebut karena pelaksanaannya tidak efektif, respon Wajib Pajak saat itu sangat kurang dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Sedangkan, ditahun 2008 beberapa perubahan sempat tampak dengan bertambahnya 5,6 juta wajib pajak baru, namun setelah itu tingkat kepatuhan wajib pajak stagnan, realisasi penerimaan pajak turun, begitu pula tax ratio yang tidak naik signifikan.

Berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2016, Indonesia telah menerapkan pengampunan pajak (*tax amnesty*) bagi para wajib pajak yang mau menarik dananya dari luar negeri dan di parkir di

Indonesia. Pelaksanaan tax amnesty pada tahun ini berlangsung selama 2 periode, yaitu periode pertama telah berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan kini kita memasuki Pengampunan Pajak periode kedua yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Kebijakan ini pun langsung menimbulkan pro dan kontra bagi beberapa pihak karena mengingat pelaksanaan program tax amnesty pada tahun 1984 dan 2008 tidak menimbulkan efek yang signifikan bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Selain itu banyak pihak yang kontra karena kebijakan ini perlu kajian yang mendalam untuk dilakukan seperti kekuatan hukum sistem administrasi yang harus memadai untuk mendorong wajib pajak lebih mudah membayar pajak dan kajian lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) untuk Mengatasi Masalah Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Surakarta Tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena data yang diperoleh dari penelitian ini tidak disajikan dalam bentuk angka. Melainkan data tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi dengan pendalaman teori. Hal ini merujuk pada pengertian penelitian

kualitatif yang diungkapkan oleh Lexy. J. Moleong (2007: 6) yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi di lapangan, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Lebih lanjut Sukmadinata (2010: 72) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang suatu fenomena-fenomena, baik alamiah ataupun rekayasa manusia.

Tempat penelitian merupakan tempat di mana dilakukannya penelitian, sehingga peneliti memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Alasan atau pertimbangan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta terdapat cukup data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini. Setelah peneliti menentukan lokasi penelitian, maka selanjutnya adalah menentukan jadwal kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2016 dan 22 Desember 2016.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik

suatu objek ataupun subjek. Subjek pada penelitian ini adalah para wajib pajak di wilayah Surakarta yang terbagi atas 5 kecamatan dan 51 kelurahan.

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sugiyono (2013: 193) mengungkapkan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan sumber data sekunder menggunakan web pajak, jurnal, majalah, koran, artikel, dan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang penulis teliti.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena dengan teknik pengumpulan data maka akan mudah dalam mendapatkan sebuah data sehingga data akan dapat segera diolah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu (Prastowo, 2012: 145). Lebih lanjut Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang diwakili oleh Kepala seksi Pusat Data dan Informasi (PDI). Hasil wawancara yang didapat digunakan untuk mencari dan menggali informasi mengenai pelaksanaan *tax amnesty* di wilayah Surakarta.

2. *Library Research* (Study Pustaka)

Data ini diperoleh dengan mempelajari buku-buku referensi, yakni web pajak (www.pajak.go.id), jurnal, majalah, koran, artikel, dan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang penulis teliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis data ini adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Model analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan (*verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengertian Pajak secara umum bisa didefinisikan sebagai pungutan atau iuran yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan Undang-

Undang yang hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam kegiatan program kerjanya.

Pajak sebagai sebuah realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama pajak, yakni fungsi *budgeter* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

Pengampunan pajak atau *tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak-pajak masa lalu. Dalam beberapa kasus, undang-undang pengampunan pajak atau *tax amnesty* yang memperpanjang juga membebaskan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk ikut program *tax amnesty* pajak tetapi tidak mengambalnya.

Pada umumnya, pemberian *tax amnesty* bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Pendapatan Negara
2. Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Masa yang Akan Datang
3. Mendorong Repatriasi Modal atau Aset
4. Transisi ke Sistem Perpajakan yang Baru

Pada hakikatnya implementasi *tax amnesty* maupun *sunset policy* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu Negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik Wajib Pajak (WP) yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik Wajib Pajak (WP) tentu saja berbeda-beda.

Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan *tax amnesty* diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dan-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional.

Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan menjadi perubahan sikap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan formal Wajib Pajak dapat memenuhi kepatuhannya dengan selalu menghitung, membayar, dan menyampaikan SPT. Wajib Pajak harus menghitung, membayarkan, dan menyampaikan SPTnya dengan jujur dan benar sesuai dengan yang terjadi dengan pendapatan yang sesungguhnya. Pelaporan SPT harus sesuai dengan Undang-Undang PPh dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang ditentukan.

Menurut John (2007) faktor-faktor Wajib Pajak yang

berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- 1) Sanksi perpajakan
- 2) Perlakuan terhadap Wajib Pajak yang adil
- 3) Penegakan hukum
- 4) Besar Penghasilan

Pembahasan

Tax amnesty merupakan penghapusan pajak dengan cara mengungkapkan harta yang belum dilaporkan di SPT PPh dan membayar uang tebusan oleh WP orang pribadi maupun badan. Program *tax amnesty* ini dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak 1 Juli 2016 lalu. Dengan *tax amnesty* diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak, mendorong reformasi perpajakan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada masa yang akan mendatang.

Pada tahun 2016 ini *tax amnesty* dilakukan 2 periode. Pengampunan Pajak periode pertama telah berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan kini kita memasuki Pengampunan Pajak periode kedua yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di KPP Pratama Surakarta, setelah diadakan sosialisasi yang menggandeng komunitas, asosiasi dan lainnya mengenai *tax amnesty* mulai bulan September 2016 menunjukkan bahwa peminat *tax amnesty* atau program pengampunan pajak di

Surakarta cukup tinggi. Bahkan dari data yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, hingga saat ini sudah mencapai Miliaran Rupiah uang tebusan dari wajib pajak yang disetorkan.

Kepala KPP Pratama juga menyebutkan bahwa akan semakin banyak wajib pajak yang akan mendeklarasikan hartanya di KPP Pratama. Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya data yang menunjukkan peningkatan wajib pajak yang melaporkan hartanya pada periode kedua ini.

Peningkatan tersebut disebabkan karena jumlah uang tebusan yang harus dibayarkan oleh WP sangat ringan, yaitu dua persen dari total harta yang dilaporkan. Dengan adanya uang tebusan yang ringan maka WP tidak merasa begitu terbebani, mengingat pada tahun 2017 jumlah uang tebusan yang harus dibayarkan akan meningkat, yaitu sebesar tiga persen dari total harta yang dilaporkan dan pada periode selanjutnya akan meningkat lagi menjadi lima persen dari harta yang dilaporkan. Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Surakarta sangat baik, yaitu dengan menambahkan petugas peneliti dan penerima layanan *tax amnesty* dua kali lipat dari sebelumnya. Total petugas saat ini masing-masing 16 orang. Dengan adanya peningkatan pelayanan, maka wajib pajak akan merasa puas ketika melakukan pembayaran pajak di KPP Pratama Surakarta.

Namun, peningkatan yang terjadi sampai bulan Desember

ini ternyata belum mencapai target yang diharapkan, yaitu terjadi peningkatan 44 persen atau sebesar Rp 1,9 Triliun. Banyak para wajib pajak (WP) yang masih menyimpan hartanya di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih kurang. Setelah diteliti, ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak di wilayah Surakarta. Faktor tersebut antara lain:

1. Kemauan membayar pajak
Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai seseorang untuk mau, rela, dan menukarkan sesuatu untuk memperoleh timbal balik barang atau jasa. Kemauan membayar pajak membuktikan bahwa seseorang telah mengetahui tentang pengetahuan tentang pajak, khususnya untuk kelebihan dan kekurangan membayar pajak.

2. Kesadaran wajib pajak
Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu penunjang pembangunan negara. Penundaan pembayaran pajak ataupun pengurangan beban pembayaran pajak akan sangat merugikan negara tentu saja akan merugikan untuk diri sendiri. Ketika setiap Wajib Pajak sadar akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak maka akan tercipta kepatuhan wajib pajak yang baik.

3. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan
Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami tentang peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib

pajak yang tidak mengerti dan memahami peraturan perpajakan maka akan cenderung tidak taat dalam pajaknya. Semakin paham wajib pajak memahami perturan perpajak maka akan semakin sedikit wajib pajak untuk melalaikan dalam pembayaran pajaknya. Sehingga wajib pajak akan patuh untuk selalu membayar dan melaporkan pajaknya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa wajib pajak yang menanyakan persyaratan dan tata cara mengikuti program pengampunan pajak atau *tax amnesty*

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program pengampunan pajak atau (*tax amnesty*) untuk mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak di wilayah Surakarta tahun 2016 dapat dikatakan sudah efektif meskipun hasilnya belum maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan pelaporan harta para wajib pajak kepada KPP Pratama Surakarta meskipun peningkatan tersebut belum mencapai target yang diharapkan pada periode ini, yang akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2016.

1. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan lagi pada tahun 2017 dengan menggunakan program pengampunan pajak atau *tax amnesty* dengan

adanya perbaikan pelayanan dan sosialisasi mendalam kepada wajib pajak, mengingat faktor yang menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak di wilayah Surakarta adalah kemauan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

- Tax Amnesty KPP Siapkan Petugas Khusus*. Diakses melalui <http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id=berita+pajak++tax+amnesty+%2C+kpp+siapkan+petugas+khusus> pada tanggal 25 Desember pukul 20.19.
- Awwaliatul Mukharomah, Suci Noor Aeny, dan Retno Megawati. (2016). *Pentingnya peran tax amnesty 2016'*. Inside Tax. Edisi 37 (2016).
- Ilyas, Wirawan B. & Burton, Richard. (2008). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Istiqomah. (2016). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul*. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Prastowo, Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Puji, Setyo. (2016). *Tax Amnesty KPP Pratama Himpun Rp 2,09 Miliar Uang Tebusan*. Diakses melalui <https://pengampunanpajak.com/2016/08/11/tax-amnesty-kpp-pratama-himpun-rp-209-miliar-uang-tebusan/> pada tanggal 25 Desember pukul 20.09.
- Siti, M., Haris, W. dan Intan, Immanuel. (2014). *Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi pada KPP pratama Kota Madiun)*. Jurnal: Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.
- Sony, D., Siti, K. R. (2006). *Perpajakan Konsep Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdyakarya.
- Syafirda, Fakhri Nurhayati . (2016). Analisis Penerapan Tax Amnesty di Indonesia dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara pada Sektor Perpajakan (Versi Elektronik). *Jurnal Pendidikan Perpajakan*, 3 (3). Diperoleh pada tanggal 25 Desember 2016 melalui http://journal.bakrie.ac.id/index.php/jurnal_ilmiah_ub/article/view/1292.
- Regiومان, "Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia". (www.kemendukper.go.id).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).

PERAN GURU DALAM MENERAPKAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PEMBELAJARAN PKN DI SD NEGERI PETIR KABUPATEN BANYUMAS

Dwi Yuniasih Saputri

Prodi S2 PGSD Pascasarjana UNS

Email: Dwiyuniasihsaputri@student.uns.ac.id

ABSTRACT. *This study aims to determine teacher's implementation of Pancasila values through the eyes of Civics students at SDN 1 Lightning. This study uses descriptive qualitative research. Total population were all fifth grade totaling 30 students by using purposive sampling using saturation sampling because if the amount of the subject is less than 100 then it is better taken all (2010: 134). Collecting data using questionnaires, observations, and interviews. Questionnaires were distributed to the respondents there are two types to find out how much the teacher's role in implementing Pancasila values in teaching civics's 27 questions and questionnaires to determine the application of Pancasila values 37 questions. Civics teacher's role in the implementation of Pancasila values through civic education subjects, be implemented in everyday life. The results of this study indicate that the Civics teacher role in the implementation of Pancasila values through the eyes of Civics, by integrating the values of Pancasila in learning. Teachers become exemplary in applying the values of Pancasila and invite students to apply the attitudes that reflect the values of Pancasila. Once students get eye Civics mostly fifth grade students at SDN 1 Lightning Banyumas has implemented Pancasila values in everyday life.*

Keywords: *Role of Teachers, values of Pancasila, Civics*

PENDAHULUAN

Nasional (SPN) dalam UU No. 20 tahun 2003 yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam menerapkan pendidikan guru

tidak hanya menyampaikan materi saja, melainkan membentuk kepribadian siswa. Kepribadian yang dibentuk oleh guru harus sesuai dengan jatidiri bangsa Indonesia. Jatidiri bangsa Indonesia terbentuk dari nilai-nilai luhur yaitu Pancasila. Sehingga pelaksanaan pendidikan harus berpedoman pada Pancasila sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUSPN 2003 bahwa Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pancasila merupakan sistem nilai (*value system*) yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur dan kebudayaan bangsa Indonesia, yang berakar dari unsur-unsur kebudayaan secara keseluruhan terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Proses terjadinya Pancasila melalui suatu proses yang disebut kausa materialism karena nilai-nilai Pancasila sudah ada dan merupakan suatu realita yang hidup sejak jaman dulu yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan yang diyakini kebenarannya itulah yang menimbulkan tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkannya dalam sikap dan tingkah laku serta perbuatannya (Kaelan, 2007:13). Sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada Pancasila.

Notonagoro dalam Sunoto (1991:50) mengemukakan bahwa

Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pandangan hidup dan menjadi alat pemersatu bangsa. Nilai yang tertera pada lima sila tersebut merupakan ideologi yang digunakan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima dasar utama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut mempunyai makna yang mendalam sehingga menjadi dasar pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Guru menurut UU No. 14 tahun 2005 adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam penerapan nilai-nilai Pancasila guru mempunyai peran yang strategis karena guru yang menjadi pelaku utama dalam pendidikan. Guru harus bisa menjadi pengasuh, pembimbing dan menjadi teladan bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku guru dalam kehidupan sehari-hari diamati secara langsung oleh siswa. Selain itu,

perilaku anak cenderung meniru apa yang dicontohkan oleh guru. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Wuryandani dan Faturrohan (2012: 44) yang mengemukakan bahwa kemampuan anak usia sekolah dasar untuk meniru apa yang dilihat cukup kuat. Oleh karena itu, khususnya dalam pembelajaran nilai moral yang menjadi model utama di sekolah adalah guru. Guru menjadi sumber inspirasi bagi siswa, sehingga sosok seorang guru menjadi panutan bagi siswa.

Upaya guru dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena akan berpengaruh terhadap kepribadian siswa terutama di Sekolah Dasar. Usia anak SD (sekitar 6-12 tahun) merupakan tahap penting dalam penanaman nilai karena pada usia tersebut anak sedang mengalami perkembangan fisik dan motorik tak terkecuali perkembangan kepribadian, watak emosional, intelektual, bahasa, budi pekerti, dan moralnya yang bertumbuh pesat.

Upaya guru dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui pengajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang tepat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan cara menginternalisasikan sesuai dengan muatan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut Susanto (2015: 233)

Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar memberikan pelajaran pada siswa untuk memahami dan membiasakan dirinya dalam kehidupan di sekolah atau di luar sekolah, karena materi Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada pengamalan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjang oleh pengetahuan dan pengertian sederhana sebagai bekal untuk mengikuti pendidikan berikutnya. Salah satu tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu agar siswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional.

Namun, nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan saat ini sudah berkurang esensinya. Hal tersebut juga diperkuat oleh Paul Bauman dalam karyanya yang berjudul "*this issue of the progress of education reform was made possible by a grant from the GE Foundation*" mengemukakan bahwa kontribusi adanya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah umum telah berkurang sedikit dalam 50 tahun terakhir. Jika dicermati adanya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang sebelumnya bernama PPKn telah menghilangkan kata Pancasila yang sebelumnya

berfokus pada maksud dan tujuan Pancasila. Pancasila saat ini telah berkurang eksistensinya. Hal tersebut ditandai masih ada beberapa siswa yang lupa akan butir-butir Pancasila. Pancasila saat ini tidak dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga jatidiri bangsa Indonesia semakin memudar. Selain itu, nilai-nilai Pancasila saat ini mulai tergerus karena adanya arus globalisasi dan budaya barat.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti peran yang dilakukan oleh guru dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan oleh guru dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui dalam proses pembelajaran guru yang notabene menjadi teladan sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dan setelah mendapatkan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan apakah siswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Sukmadinata (2012:18) mengemukakan penelitian deskriptif (*descriptive research*)

ditunjukkan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Sehingga berdasarkan definisi di atas, maka penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan fakta dan fenomena berdasarkan interpretasi dari orang-orang yang terlibat dalam penelitian.

Subyek penelitian adalah guru kelas dan siswa kelas V. Subyek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Lokasi penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih adalah SD Negeri 1 Petir Kabupaten Banyumas jalan Kalianja No. 1 Petir, Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas 53191 yang dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih selama satu minggu. Sumber data dalam kegiatan penelitian ini meliputi: (1) orang (informan) yang dipilih secara purposive; (2) buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini yang dapat berupa buku seperti buku tentang Pancasila, dokumen-dokumen atau perangkat pembelajaran yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila, buku tentang Pendidikan Kewarganegaraan serta buku tentang metode penelitian.

Peneliti dalam mengumpulkan data

menggunakan angket, wawancara dan observasi. Sukmadinata (2012: 219) mengemukakan angket atau kuesioner (*questionnaire*) merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan atau pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Angket yang ada 2 jenis yaitu angket untuk mengukur peran guru dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila yang berjumlah 27 item pernyataan dan angket yang digunakan untuk mengukur penerapan nilai-nilai Pancasila siswa berisi 37 item pernyataan yang diberikan kepada seluruh responden yaitu siswa kelas V yang berjumlah 35 siswa. Peneliti menggunakan skala Guttman dalam menyusun angket. Menurut Sugiyono (2015: 96) skala Guttman digunakan apabila ingin mendapatkan jawaban yang jelas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan.

Peneliti juga dalam melakukan observasi untuk mengumpulkan data. Sukmadinata (2012: 220) mengemukakan observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan yang dilakukan dalam observasi adalah mengamati peran guru dalam

menerapkan nilai-nilai Pancasila siswa di SD Negeri 1 Petir melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pengamatan yang dilakukan peneliti, yaitu mengamati suasana belajar di kelas, yaitu pada saat proses belajar mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berlangsung. Sukmadinata (2012: 216) mengemukakan wawancara atau interviu (*interview*) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Wawancara dilakukan kepada guru kelas V mengenai: proses pelaksanaan pembelajaran PKn di kelas V, persepsi siswa kelas V terhadap pembelajaran nilai-nilai Pancasila dalam PKn, faktor pendukung dan kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kendala dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada pelaksanaan pembelajaran PKn kelas V di SD Negeri 1 Petir Kabupaten Banyumas. Persiapan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan untuk memperoleh data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis data ini adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Menurut Sugiyono (2015: 337) model Miles dan Huberman terdiri

dari tiga langkah yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan (*verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Menurut Narmoatmojo (2010: 1) Pancasila yang berisi seperangkat nilai-nilai dasar ideal, merupakan komitmen kebangsaan, identitas bangsa dan menjadi dasar pembangunan karakter keindonesiaan. Mendasarkan pada perspektif teori fungsionalisme struktural, sebuah negara bangsa yang majemuk seperti Indonesia membutuhkan nilai bersama yang dapat dijadikan nilai pengikat integrasi (*integrative value*), titik temu (*common denominator*), jati diri bangsa (*national identity*) dan sekaligus nilai yang dianggap baik untuk diwujudkan (*ideal value*). Bagian terpenting penanaman nilai-nilai Pancasila di dunia pendidikan tidak hanya meliputi materi, tetapi juga sikap-sikap yang dibentuk dalam nilai Pancasila itu sendiri. Karena meskipun diberikan mata pelajaran tentang nilai-nilai Pancasila, belum tentu siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Susanto (2015: 225-226) mengemukakan pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya

bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral ini diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan siswa sehari-hari, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan YME, yang merupakan usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antarwarga dengan negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Dengan pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan mampu membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik (*good citizen*).

Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar memberikan pelajaran pada siswa untuk memahami dan membiasakan dirinya dalam kehidupan pada siswa untuk memahami dan membiasakan dirinya dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjang oleh pengetahuan dan pengertian sederhana sebagai bekal untuk mengikuti pendidikan berikutnya.

Materi pembelajaran atau bahan ajar (*instruksional materials*) secara garis besar terdiri atas pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Menurut Azra dalam Susanto (2015: 226), pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule*

of law, HAM, hak dan kewajiban warga negara serta proses demokrasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru mempunyai tugas yang penting dalam menyelenggarakan pendidikan. Karena output yang dihasilkan akan bergantung pada seberapa besar peran yang dilakukan guru untuk mencerdaskan siswa. Guru tidak hanya bertugas untuk mengajarkan materi pelajaran tetapi bertugas untuk membentuk kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pembahasan

Guru SD Negeri 1 Petir dapat menjadi teladan yang baik untuk para siswanya, yang ditandai dengan mampu melaksanakan perannya sebagai seorang sosok teladan yang baik. Sosok guru SD Negeri 1 Petir mampu menjalankan perannya sebagai guru inspirator bagi peserta didiknya. Guru di SD Negeri 1 Petir menjalankan perannya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik, dan melakukan berbagai macam cara untuk mengajak siswa menerapkan nilai-nilai Pancasila

dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penghitungan kuesioner yang telah diisi oleh siswa yang disajikan dalam diagram berikut ini.

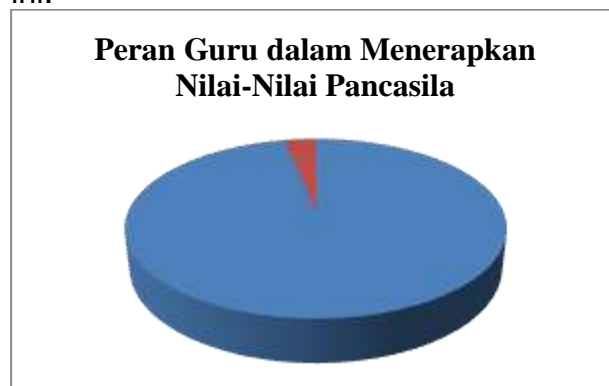


Diagram Peran Guru dalam Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila

Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa peran guru dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila termasuk kategori tinggi yaitu sebesar 96,8%. Hal tersebut juga didukung dengan hasil observasi pada saat pembelajaran PKN khususnya dalam mengajarkan materi PKN. Peran yang dilakukan guru yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Kemudian nilai tersebut diintegrasikan dalam setiap komponen yang terdapat dalam perangkat pembelajaran. Setelah itu merelevankan antara nilai Pancasila dengan kegiatan belajar, materi pokok, indikator, penilaian dan sumber belajar. Penyampaian materi pokok yang disajikan oleh guru memuat nilai-nilai Pancasila yang diintegrasikan pada sub materi beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari agar

mudah dipahami siswa. Tidak hanya dalam pemberian materi siswa ditanamkan nilai-nilai Pancasila, namun juga lebih ditekankan pada sikap siswa ketika mengikuti pembelajaran PKn di kelas sehingga tidak hanya secara kognitif tetapi diharapkan juga dalam segi afektif dan psikomotor. Secara keseluruhan peneliti mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh guru telah menerapkan semua sila-sila Pancasila.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran diawali dari memulai pembelajaran sebelum dan sesudah berdoa. Guru dalam pembelajaran memberikan pemahaman bahwa setiap manusia harus mempunyai keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan harus mempunyai sikap toleransi antar umat beragama. Penjelasan tersebut juga diperkuat dengan contoh-contoh penerapan nilai Pancasila ke-1 yang mudah dipahami. Selain itu, pada saat pembelajaran mendengar suara adzan maka pembelajaran akan dihentikan terlebih dahulu. Guru di SD Negeri Petir juga mewajibkan siswa kelas tinggi untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah di sekolah.

Guru dalam pembelajaran juga telah memperlakukan siswa dengan sama, tidak membedakan perlakuan kepada siswa hanya karena perbedaan status sosial antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Guru memperlakukan siswa dengan penuh perhatian dan kasih

sayang. Penyampaian materi juga berjalan dengan baik karena guru selalu membantu kesulitan dan masalah yang dialami oleh siswa. Pembelajaran yang dilaksanakan juga berjalan dengan efektif dan menyenangkan karena guru bersikap demokratis dan tidak memaksakan kehendak kepada siswa. Tidak hanya pada saat pembelajaran, guru juga menanamkan kebiasaan siswa untuk melaksanakan 3S (Senyum, Sapa dan Salam) baik dilingkungan sekolah maupun di masyarakat. Guru berusaha untuk melakukan kerjasama bersama orangtua untuk menunjang kepentingan pendidikan, seperti bekerja sama untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Uraian di atas merupakan penerapan sila Pancasila ke-2 yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Penerapan sila Pancasila ke-3 yaitu Persatuan Indonesia dalam pembelajaran dapat diidentifikasi pada saat guru bekerja sama dalam menyelenggarakan pendidikan dengan guru yang lain. Guru menanamkan sikap kepada siswa untuk menerapkan prinsip "kalau bukan sekarang, kapan lagi dan kalau bukan kita siapa lagi". Prinsip tersebut akan tertanam kepada siswa untuk tidak menunda pekerjaan dan memulai sesuatu yang baik dari hal kecil dan dimulai dari diri sendiri. Penerapan sila ke-3 juga tercermin pada saat guru lebih mementingkan kepentingan bersama dan tidak pernah

mengeluh. Sikap yang demikian akan ditiru oleh siswa, karena dalam pembelajaran guru merupakan aktor utama yang menjadi teladan dan inspirator bagi siswa.

Kegiatan inti yang diterapkan oleh guru menggunakan metode diskusi dengan memberikan tugas secara berkelompok untuk memahami materi PKn yang memuat nilai-nilai Pancasila. Kegiatan diskusi melatih siswa untuk mengemukakan pendapat dan belajar menghormati pendapat orang lain. Guru menanamkan kebiasaan pada siswa untuk melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Pada tahap konfirmasi siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Hal tersebut merupakan penerapan sila Pancasila ke-4 yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Penerapan sila Pancasila ke-5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yaitu dalam pembelajaran guru bersikap adil kepada semua siswa dalam pembelajaran. Guru memberikan informasi kepada siswa ataupun orangtua dengan santun dan ramah. Guru tidak membedakan siswa antara siswa yang berasal dari keluarga miskin dan kaya. Selain itu, guru menjaga etika, tata krama, tutur kata, penampilan dan gaya hidup yang tidak berlebihan.

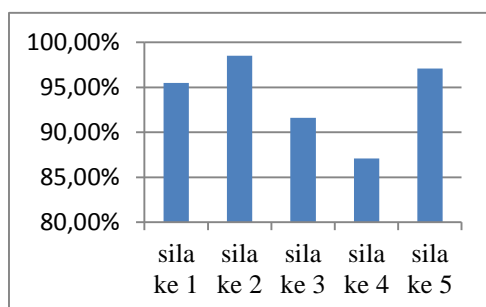
Penjelasan di atas membuktikan bahwa dalam proses pembelajaran PKn di kelas

V selalu diusahakan memuat nilai-nilai Pancasila bagi siswa. Implementasi nilai-nilai Pancasila telah diterapkan di SD Negeri 1 Petir termasuk implementasinya dalam pembelajaran PKn yang selalu dikaitkan oleh guru dalam setiap komponen yang ada dalam pembelajaran. Hal tersebut membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki peranan penting dalam membentuk mental, sikap dan moralitas siswa sehingga dapat tercipta generasi penerus bangsa yang berkualitas demi kemajuan bangsa. Interaksi siswa dengan siswa dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan diskusi kelompok, presentasi maupun saling meminjamkan alat tulis. Metode diskusi yang digunakan guru mata pelajaran PKn adalah untuk menanamkan nilai Pancasila kepada siswa secara menyeluruh, karena nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Strategi pembelajaran dengan diskusi kelompok akan membantu siswa untuk menumbuhkan perilaku bekerjasama. Diskusi kelompok dapat melatih siswa untuk belajar bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah, saling bertukar pendapat, berani mengemukakan pendapat, serta melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Siswa kelas V yang melakukan diskusi kelompok menjadi tidak kondusif. Diskusi kelompok dan presentasi dapat berjalan dengan cukup baik meskipun kondisi kelas menjadi tidak kondusif. Realisasi

penugasan dijadikan indikator dalam proses pembelajaran yang memuat nilai-nilai Pancasila karena dengan pemberian tugas akan membantu siswa untuk bersikap tanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai siswa.

Peran yang dilakukan oleh guru dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan tingkah laku siswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila siswa kelas V SD Negeri 1 Petir Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Penerapan Nilai-Nilai Pancasila di SD Negeri 1 Petir



95,50% siswa telah menerapkan sila ke-1, 98,50% siswa telah menerapkan sila ke-2, 91,60% siswa telah menerapkan sila ke-3, 87,10% siswa telah menerapkan sila ke-4 dan 97,10% siswa telah menerapkan sila ke-5. Tingkat penerapan nilai-nilai Pancasila yang tertinggi pada siswa kelas V yaitu dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sila ke-1 dan yang terendah yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila sila ke-3. Siswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sila ke-1 lebih tinggi dibandingkan dengan penerapan sila Pancasila yang lain karena

guru berusaha mengajak siswa berdoa setiap akan melaksanakan kegiatan di sekolah (sebelum dan sesudah belajar), guru juga mewajibkan siswa untuk melaksanakan sholat berjamaah pada saat sholat duhur dan mengadakan kajian agama lebih mendalam pada hari Jumat seperti tadarus serta pengajian. Di kelas V SD Negeri Petir semua siswa beragama Islam sehingga tidak muncul permasalahan yang didasarkan atas perbedaan agama. Tingkat penerapan sila ke-3 merupakan yang terendah dibandingkan penerapan sila-sila Pancasila yang lain karena dalam pembelajaran terlihat pada saat diskusi siswa kurang antusias. Selain itu siswa juga masih kurang aktif berpartisipasi dalam acara yang bersifat nasionalisme dan siswa lebih senang menyukai barang-barang yang berasal dari luar negeri dibandingkan barang-barang yang diproduksi dalam negeri.

Pemahaman siswa terhadap pembelajaran nilai-nilai Pancasila dapat dilihat melalui tingkah laku siswa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Siswa dapat menjelaskan arti dari nilai-nilai Pancasila menurut pemahaman mereka masing-masing sesuai yang diajarkan oleh guru dalam mata pelajaran PKn serta bisa menyebutkan contoh penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Menurut siswa kelas V tentang definisi nilai-nilai Pancasila yaitu nilai-nilai luhur yang timbul dari bangsa Indonesia sebagai pedoman dan pandangan hidup masyarakat;

atau nilai-nilai yang digunakan sebagai ideologi Negara yang berisi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Pengetahuan siswa tentang Pancasila sangat penting karena Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan dasar dalam bertingkah laku untuk mewujudkan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari definisi yang dijelaskan siswa serta beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila yang telah disebutkan tersebut dapat membuktikan bahwa siswa kelas V sudah paham dan mengerti juga menerapkan nilai-nilai Pancasila yang telah diajarkan guru dalam pembelajaran PKn dari sila kesatu hingga sila kelima Pancasila. Peran guru sebagai pelaku utama dalam pembelajaran yang bertugas memberi teladan bagi siswa sudah terlaksana sehingga membuktikan teori yang dikemukakan oleh Mulyasa (2011: 8) bahwa perilaku guru sepanjang proses pembelajaran harus merupakan model pelaksanaan nilai-nilai Pancasila bagi siswa.

Persepsi siswa terhadap pembelajaran nilai-nilai Pancasila yang telah diajarkan oleh guru merupakan salah satu bukti bahwa guru kelas V di SD Negeri 1 Petir Kabupaten Banyumas telah mengimplementasikan pembelajaran nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan meskipun masih belum terlaksana secara

maksimal. Hal tersebut memperkuat penelitian yang sebelumnya oleh Nurdin (2015) yang berjudul *The Policies on Civic Education in Developing National Character in Indonesia*. Dalam penelitian tersebut mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dasar nilai-nilai pendidikan menekankan pada realisasi warga negara yang baik, yang memiliki kompetensi holistik dalam pengetahuan, keterampilan, dan sifat-sifat berdasarkan karakter nasional (nilai-nilai Pancasila atau Pancasila Indonesia).

Manfaat yang diperoleh siswa setelah pembelajaran PKn yang memuat nilai-nilai Pancasila adalah dapat memahami isi dan arti penting nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tersebut akan menjadi bekal bagi siswa untuk studi selanjutnya dan dalam kehidupan di masyarakat. Dampak yang dirasakan secara luas yaitu untuk mewujudkan manusia yang sesuai dengan jatidiri bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hamalik (2003: 35) bahwa dalam proses pembelajaran memiliki tujuan agar siswa memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman, serta perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik. Pembelajaran sendiri bertujuan untuk membantu siswa agar memperoleh berbagai

pengalaman dan dengan pengalaman tersebut tingkah laku siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa menjadi bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Guru dalam menerapkan pembelajaran yang memuat nilai-nilai Pancasila terdapat faktor pendukung dan kendala yang dihadapi. Faktor yang mendukung tercapainya pembelajaran PKn yang memuat nilai-nilai Pancasila yaitu:

- a. Kesiapan siswa secara fisik dan psikologis akan berpengaruh terhadap hasil pembelajaran baik dari aspek kognitif, psikologi dan psikomotorik.
- b. Suasana di sekitar lingkungan sekolah yang mendukung.
- c. Sarana dan prasarana yang memadai seperti media pembelajaran, musholla, perpustakaan, slogan-slogan untuk mengingatkan siswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
- d. Konsentrasi dan perhatian siswa terhadap pembelajaran.
- e. Pemilihan metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila
- f. Minat dan motivasi siswa terhadap proses pembelajaran.

Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam

menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran yaitu:

- a. Guru mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan SK dan KD dalam materi pembelajaran PKn yang akan diajarkan pada siswa. Selain itu, guru belum mencantumkan pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (PKn).
- b. Dalam proses pembelajaran terdapat siswa yang gaduh, tidak memperhatikan materi yang disampaikan serta rendahnya antusiasme siswa terhadap mata pelajaran PKn sehingga pembelajaran kurang kondusif.
- c. Guru dalam membuat perencanaan pembelajaran mengalami kesulitan seperti menentukan media dan metode yang sesuai dengan pembelajaran yang memuat nilai-nilai Pancasila. Guru mempunyai pengetahuan yang sedikit mengenai media dan metode yang akan diterapkan sehingga guru dalam pembelajaran kurang bervariasi. Guru lebih sering menggunakan metode pembelajaran ceramah dan diskusi sedangkan penggunaan media pembelajaran jarang dilakukan dalam pembelajaran.

- d. Kurangnya partisipasi dari keluarga, kurangnya perhatian dan teladan yang baik dari keluarga maupun masyarakat (lingkungan masyarakat kurang terpelajar), kondisi sosial ekonomi siswa dengan latar belakang yang menengah ke bawah menyebabkan keluarga hanya berorientasi pada pemenuhan materi untuk anaknya sehingga kurangnya pengawasan dalam memperhatikan perkembangan anak.
- e. Kurang adanya kerjasama wali murid dengan pihak sekolah sehingga terkesan wali murid menyerahkan anaknya secara penuh ke pihak sekolah dan kemajuan teknologi terutama HP yang ikut membawa dampak negatif bagi siswa.

Upaya Mengatasi Kendala Pembelajaran PKn yang memuat nilai-nilai Pancasila yaitu:

- a. Guru menambah wawasan mengenai pembuatan RPP yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila. Guru seharusnya lebih kreatif dalam mengaitkan nilai-nilai Pancasila sehingga materi yang disampaikan guru sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam RPP.
- b. Guru berusaha mengembangkan model pembelajaran yang bervariasi agar

- pembelajaran menjadi terpusat dan menyenangkan serta terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila;
- c. Guru melakukan inovasi dan memperbanyak referensi mengenai media pembelajaran sehingga dapat menunjang penerapan nilai-nilai Pancasila pada saat proses belajar mengajar dan memberikan motivasi kepada siswa;
- d. Guru harus pintar menarik perhatian dan minat siswa agar siswa memiliki semangat dan antusias pada pelaksanaan pembelajaran PKn yang memuat nilai-nilai Pancasila
- e. Semua pihak sekolah berusaha memberikan teladan yang baik kepada siswa serta sosialisasi penerapan dan pengintegrasian nilai-nilai Pancasila melalui proses pembelajaran;
- f. Memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar peraturan sekolah;
- g. Melakukan pembiasaan-pembiasaan kegiatan yang mengandung pembelajaran nilai-nilai Pancasila di sekolah;
- h. Menertibkan bimbingan oleh guru kelas dan menerbitkan buku pedoman kepribadian;
- i. Mendatangkan psikiater (orang yang ahli dalam bidang psikologi) untuk

menangani siswa yang bermasalah;

- j. Memberikan motivasi kepada seluruh guru dan warga sekolah yang lain;

Bekerjasama dengan orang tua/wali murid dalam mendidik siswa dengan cara memberikan perhatian dan pengawasan pada siswa. Karena pihak yang paling bertanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membesarkan anak-anak menjadi generasi yang tangguh adalah orang tua, karena orang tua adalah pihak yang paling dekat dengan anak sehingga kebiasaan yang diterapkan di lingkungan keluarga dan segala tingkah laku yang terbentuk dalam keluarga menjadi contoh dengan mudah ditiru anak (Wibowo, 2011:120).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah terlaksana, guru berperan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui mata pelajaran PKn. Peran guru dalam pembelajaran PKn yang memuat nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terbentuk pada siswa di SD Negeri 1 Petir yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Nilai-nilai Pancasila yang telah terbentuk pada siswa akan menjadi bekal untuk kehidupan

berbangsa dan bernegara. Peran yang telah dilakukan oleh guru dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sudah mencerminkan usaha yang maksimal yaitu sebesar 96,8%. Dampak yang didapatkan siswa atas peran yang dilakukan oleh guru yaitu sebagian besar siswa sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dibuktikan dengan penghitungan hasil kuesioner menunjukkan bahwa 95,50% siswa telah menerapkan sila ke-1, 98,50% siswa telah menerapkan sila ke-2, 91,60% siswa telah menerapkan sila ke-3, 87,10% siswa telah menerapkan sila ke-4 dan 97,10% siswa telah menerapkan sila ke-5. Pemahaman siswa terhadap pembelajaran nilai-nilai Pancasila dapat dilihat melalui tingkah laku siswa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Siswa dapat menjelaskan arti dari nilai-nilai Pancasila menurut pemahaman mereka masing-masing sesuai yang diajarkan oleh guru dalam mata pelajaran PKn serta bisa menyebutkan contoh penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Perilaku siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila juga telah tercermin melalui pengamatan guru baik disekolah maupun dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Dadang. 2008. Peranan Guru PKn dalam Membina Budi Pekerti Siswa

- (Penelitian Deskriptif di SMA Negeri 1 Margahayu Kabupaten Bandung). Tesis S2 PKn Sps UPI Bandung. Tidak diterbitkan.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baumann, Paul. *This issue of The Progress of Education Reform was made possible by a grant from the GE Foundation*. Vol. 14 (2).
- Darmadi, Hamid. 2009. *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Bandung: Alfabeta.
- Elmubarok, Zaim. 2009. *Membumikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Hamalik, Oemar. 2003. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ine Kusuma Aryanti, dan Markum Susatim, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai*.
- Isna, Mansur. 2001. *Diskursus Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Paradigma.
- Levine, Peter & Kei Kawashima-Ginsberg. 2015. *Civic Education and Deeper Learning*. Tufts University Hal 15.
- Mulyasa. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nurdin, Encep Syarif. *The Policies on Civic Education in Developing National Character in Indonesia*. Hal 1.
- Prasetyo, Bambang dan Miftahul Jannah. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sunoto. 1991. *Mengenal Filsafat Pancasila 1 (Pendekatan melalui Metafisika, Logika, dan Etika)* (volume 3). Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Susanto, Ahmad. 2015. *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarbaini, Syahrial. 2010. *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Taneko, Soleman B. 1984. *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali

- Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan
Nasional. Jakarta:
Pemerintah Republik
Indonesia.*
- Wahab, Abdul Azis. 2002.
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan.
Bandung: CV Maulana.*
- Wibowo, Agus. 2011. Strategi
Membangun Karakter
Bangsa Berperadaban.
Yogyakarta: Pustaka
Pelajar*
- Winarno. 2013. Pembelajaran
Pendidikan
Kewarganegaraan.
Jakarta: Bumi Aksara.*
- Wuryandani & Faturrohman.
2012. Pembelajaran
Pendidikan
Kewarganegaraan di
Sekolah Dasar.
Yogyakarta: Penerbit
Ombak.*

PERAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGHAYATAN PANCASILA DI SD NEGERI 03 KARANGANYAR

Elisabet Dyah Kusuma

SD Negeri 03 Karanganyar

Email: Elisabeth_kusuma@yahoo.co.uk

ABSTRACT. *This article describes the role of the School Literacy Movement in an effort to increase appreciation of Pancasila. The purpose of this study was to (1) know the form of the literary movement School that can be implemented to increase the appreciation of Pancasila, especially in primary schools 03 Karanganyar. (2) Assess the effectiveness of the School Literacy Movement in increasing the appreciation of Pancasila, especially in primary schools 03 Karanganyar. This study using interviews and observations that researchers do informant (some students and some teachers).Based on these results it can be concluded that: (1) Form School literary movement that can be implemented to increase the appreciation of Pancasila Pancasila is habituation pronunciation, breakfast reading and reading corners. School Literacy Movement aims to foster an interest in reading in students. (2) In accordance with the indicators of the effectiveness of the School Literacy Movement is not maximized in enhancing appreciation of Pancasila on students at SDN 03 Karanganyar so it needs the active involvement of all parties.*

Keywords: *School Literacy Movement, Penghayatan Pancasila.*

PENDAHULUAN

Membaca merupakan kebutuhan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi dirinya maupun untuk memuaskan rasa keingintahuannya. Keterampilan membaca tidak lepas dari kebiasaan dan kesadaran untuk

menambah wawasan dengan membaca buku atau bahan bacaan lainnya. Melalui kegiatan membaca maka kemajuan pendidikan dapat ditingkatkan sesuai amanat UUD 1945 dengan menumbuhkan budaya membaca untuk kemajuan bangsa.

Dalam upaya untuk memajukan pendidikan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan pula Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah berharap pendidikan berfungsi seperti yang diamanatkan pada Bab II Pasal 3 yang berbunyi :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pendidikan memiliki fungsi perkembangan, yakni kemampuan dan membentuk karakter peserta didik.

Pancasila memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa termasuk Indonesia karena pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa, namun dewasa ini banyak orang yang mengesampingkan makna pancasila. Bahkan anak-anak SD sekalipun merasa bahwa pancasila hanya dijadikan sebagai pelajaran wajib sehingga kurang dihayati maknanya oleh para siswa. Siswa Sekolah Dasar merupakan cikal bakal

tumbuhnya generasi-generasi untuk masa mendatang. Para siswa dibentuk agar menjadi generasi penerus bangsa yang bermoral dan berakhlak baik sehingga perlu diberikan pendidikan yang benar-benar berkualitas. Untuk membentuk generasi bangsa yang bermoral dan berkualitas tentunya memerlukan beberapa proses salah satunya dengan membekali para siswa (khususnya siswa SD) dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebab Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa dalam menjalankan kehidupannya. Para siswa harus memahami, memaknai dan mengamalkan keseluruhan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila karena nilai-nilai itu dapat menjadi pondasi dan benteng bagi mereka dari berbagai pengaruh yang dapat merusak moral mereka. Nilai-nilai Pancasila juga mampu berperan dalam pembentukan karakter anak usia SD karena didalam Pancasila sendiri terdapat nilai-nilai yang mudah dipahami dan diamalkan pada anak usia SD.

Pada dasarnya setiap individu memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan melalui berbagai aktivitas untuk membina karakter dan kepribadian siswa. Sebagai upaya peningkatan tersebut pihak sekolah melakukan pengembangan terhadap kurikulum serta kegiatan bersama sebagai gerakan kesadaran untuk mengembangkan diri.

Kegiatan pembelajaran di sekolah diupayakan untuk membentuk karakter siswa dengan menghayati pancasila. Salah satu kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah pula adalah gerakan literasi sekolah. Gerakan Literasi Sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, Komite Sekolah, orang tua/wali murid peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha, dll.), dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Gerakan literasi dimaknai oleh setiap sekolah dengan kegiatan yang beraneka macam dan bervariasi. Kegiatan yang paling sering dan banyak dilakukan adalah gerakan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai (Permendikbud No. 23 Tahun 2015), hal ini penting dilakukan karena suasana pagi siswa masih semangat dalam belajar sehingga ketika membaca bacaan pada pagi hari maka penyerapan informasi akan mudah diterima dengan baik oleh siswa melalui bacaan yang mereka baca.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk menumbuhkan penghayatan pancasila dapat dilakukan dengan gerakan

kesadaran bersama salah satunya yaitu melalui Gerakan Literasi Sekolah yang bertujuan:

menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Demikian diharapkan siswa dapat memanfaatkan kegiatan dalam literasi sekolah karena di dalam kegiatan ini terdapat nilai-nilai positif yang dapat diambil dan dibiasakan terutama dapat mengembangkan penghayatan pancasila.

Gerakan Literasi Sekolah di SD Negeri 03 Karanganyar dilaksanakan oleh siswa kelas I sampai dengan kelas VI. Namun, kurang didukung oleh sarana dan prasarana serta kesediaan guru untuk mengarahkan siswa sehingga manfaat gerakan literasi kurang dirasakan oleh siswa. Berdasarkan pengamatan data absensi keterlambatan SD Negeri 03 Karanganyar terdapat banyak siswa yang sering terlambat dan berbicara sendiri saat melaksanakan kegiatan literasi. Pada tanggal 15 November 2016 ditemukan sebanyak 35% siswa yang terlambat dan pada tanggal 17 November 2016 ditemukan sebanyak 40% siswa yang terlambat. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang terlambat tidak mengikuti pembiasaan literasi sekolah sebelum pelajaran dimulai dan belum mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul "Peran Gerakan Literasi Sekolah dalam Upaya Meningkatkan Penghayatan Pancasila di SD Negeri 03 Karanganyar."

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian merupakan tempat di mana dilakukannya penelitian, sehingga peneliti memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 03 Karanganyar. Alasan atau pertimbangan peneliti mengambil lokasi tersebut karena dekat dengan tempat tinggal penulis dan merupakan tempat dimana peneliti bekerja, sehingga lebih efisien dan efektif dalam penggunaan waktu. Selain itu, peneliti ingin melihat sejauh mana efektivitas Gerakan Literasi Sekolah meningkatkan penghayatan pancasila. Dengan menggunakan pertimbangan tersebut di atas, diharapkan peneliti akan memperoleh data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai peneliti.

Setelah peneliti menentukan lokasi penelitian, maka selanjutnya adalah menentukan jadwal kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada tanggal 22-25 November 2016.

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas I-VI dan guru atau kepala sekolah SD Negeri 03 Karanganyar. Siswa SD Negeri 03 Karanganyar kelas I-VI berjumlah 426 siswa. Objek penelitian ini adalah kegiatan Gerakan Literasi

Sekolah dan penghayatan pancasila.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena dengan teknik pengumpulan data maka akan mudah dalam mendapatkan sebuah data sehingga data akan dapat segera diolah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Menurut Fathoni (2006: 105) bahwa wawancara teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya, pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai (*interview*) dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai (*interviewee*). Diperkuat oleh Margono (2005: 165) wawancara atau *interview* merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

Menurut Moleong (2007: 186) menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada siswa kelas I-VI SD Negeri 03 Karanganyar masing-masing kelas diambil beberapa siswa yang berjumlah 2 orang tiap kelas dengan tujuan untuk menggali informasi guna mendapatkan data yang

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan literasi sekolah di SD Negeri 03 Karanganyar meskipun peneliti menemui berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan. Wawancara juga dilakukan kepada kepala sekolah dan beberapa guru di SD Negeri 03 Karanganyar guna mendapatkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Gerakan Literasi Sekolah di SD Negeri 03 Karanganyar dan berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya.

2. Observasi

Menurut Margono (2005: 158) observasi diartikan sebagai mengamati dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Diperkuat lagi oleh Subyantoro (2014: 84) observasi dilakukan terutama untuk memantau proses dan dampak pembelajaran yang diperlukan untuk dapat menata langkah-langkah perbaikan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Menurut jenisnya, observasi dibagi menjadi dua jenis yaitu observasi sistematis dan observasi nonsistematis. Penelitian ini menggunakan jenis observasi sistematis karena dilakukan menggunakan pedoman observasi sebagai instrumen observasi. Observasi dilakukan selama proses pelaksanaan kegiatan literasi sekolah yang dilaksanakan 15 menit sebelum pelajaran yaitu pukul 07.45-08.00. Siswa kelas I-VI bertindak sebagai partisipan

aktif (pelaksana) dan peneliti bertindak sebagai partisipan pasif (observer).

Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap siswa kelas I-VI pada kegiatan literasi sekolah. Observasi terhadap siswa difokuskan pada keaktifan dan keseriusan siswa dalam mengikuti kegiatan gerakan literasi sekolah. Observasi juga dilakukan terhadap kepala sekolah dan guru dalam menggerakkan Gerakan Literasi Sekolah di SD Negeri 03 Karanganyar pada saat pelaksanaan kegiatan gerakan literasi sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Menurut Notonegoro (1974:44) penghayatan pancasila yang subyektif adalah pelaksanaan dalam pribadi seseorang, warga negara, individu, penduduk, penguasa, dan orang Indonesia berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan pancasila jika suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah berpadu menjadi kesadaran wajib moral. Dalam pengamalan pancasila yang subyektif ini bilamana nilai-nilai pancasila telah dipahami, diresapi, dan dihayati oleh seseorang maka orang itu telah memiliki moral pancasila dan jika berlangsung terus menerus sehingga melekat dalam

hati maka disebut dengan kepribadian pancasila. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa penghayatan pancasila dapat dilakukan sesuai dengan pribadi masing-masing orang dengan meresapi nilai-nilai pancasila sebagai kepribadian pancasila.

Kepribadian Pancasila dibentuk dengan pembiasaan karakter melalui Gerakan Literasi yang berjalan beriringan dalam membangun karakter atau watak warga negara muda. Karakter warga bisa dibedakan dalam karakter privat dan karakter publik. Menurut Branson dalam Winarno (2008: 50) menyatakan bahwa "*Traits of privat character such as moral responsibility, self-discipline, and respect for individual worth and human dignity. Public character such as public-spiritedness, civility, respect for law, critical-mindedness, and a willingness to negotiate and compromise*".

Termasuk karakter privat adalah tanggung jawab moral, disiplin diri, menghargai individu dan martabat kemanusiaan. Termasuk karakter publik adalah semangat kemasyarakatan, sopan, menghargai hukum, berpikir kritis, kemauan bernegosiasi dan berkompromi. Berdasarkan rumusan di atas, maka karakter baik bisa ditunjukkan dengan indikator warga negara Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis serta bertanggung jawab.

Gerakan Literasi Sekolah dan penghayatan pancasila memiliki kesamaan dalam membiasakan karakter warga negara. Gerakan Literasi Sekolah selain berjalan seiring dengan penghayatan pancasila dalam rangka pembiasaan karakter siswa, dapat pula menjadikan kegiatan literasi sekolah sebagai wahana pengembangan penghayatan nilai-nilai pancasila yaitu sila ketuhanan yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam meningkatkan penghayatan pancasila penelitian ini mengarahkan kepada Gerakan Literasi Dasar yang diimplementasikan dalam Gerakan Literasi Sekolah dengan penghayatan pancasila dengan pembiasaan pelafalan pancasila dan sudut-sudut baca. Sesuai dengan tujuan Gerakan Literasi Sekolah yang telah dijabarkan di atas, Gerakan Literasi Sekolah dapat berjalan beriringan dengan penghayatan nilai-nilai pancasila yakni dapat meningkatkan penghayatan pancasila dengan pembiasaan karakter khususnya bagi siswa. Hal ini karena Gerakan Literasi Sekolah merupakan gerakan bersama sebagai wujud kesadaran warga sekolah untuk membuka wawasan dengan kegiatan membaca dalam rangka

menghayati pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa.

Pembahasan

Deskripsi masalah penelitian merupakan tahapan dimana peneliti memperoleh data di lapangan yang terkait dengan judul "Peran Gerakan Literasi dalam Upaya Meningkatkan Penghayatan Pancasila". Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis sehingga dapat disajikan secara sistematis. Data tersebut disajikan sesuai dengan rumusan masalah dalam bab pendahuluan. Adapun aspek-aspek yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu 1. Gerakan Literasi Sekolah yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan penghayatan pancasila terutama pada siswa SD Negeri 03 Karanganyar, 2. Efektivitas Gerakan Literasi Sekolah dalam meningkatkan penghayatan pancasila terutama pada siswa SD Negeri 03 Karanganyar. Peneliti mengambil permasalahan ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui peran gerakan literasi dalam meningkatkan penghayatan pancasila pada siswa sehingga peneliti melakukan penelitian ini.

Gerakan Literasi Sekolah yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan penghayatan pancasila

Pembiasaan karakter menjadi faktor penting dari

lahirnya gerakan literasi sekolah. Karakter siswa dapat ditumbuhkan dengan beberapa cara salah satunya melalui Gerakan Literasi Sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri 03 Karanganyar (Bapak Mardiyatmoko, S.Pd.) mengatakan bahwa:

"Proses pembiasaan dilakukan melalui literasi sekolah siswa dilatih untuk gemar membaca dan terbiasa untuk berangkat pagi sehingga lebih disiplin. Program literasi didukung sepenuhnya oleh wali murid. Tujuan diadakan kegiatan literasi melalui pembiasaan ini agar minat baca anak menjadi lebih ditingkatkan, wawasan siswa menjadi lebih luas dan tentunya semangat belajar menjadi lebih meningkat karena siswa memiliki pengetahuan yang beranemacam melalui apa yang mereka baca dan pelajari. Pihak sekolah telah menyediakan fasilitas yang mendukung terlaksananya program literasi. Setiap kelas memiliki sudut baca yang digunakan untuk siswa membaca karena berisi beraneka macam buku bacaan non pelajaran yang dapat mereka baca. Selain membaca, selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai siswa juga diajak untuk melafalkan teks pancasila sebagai bentuk penghayatan pancasila sedari dini karena anak terbiasa untuk melafalkan dengan baik. Perlu sinergi yang kuat antara guru, wali murid dan siswa sendiri dalam keberhasilan program literasi ini."

Begitu pula dengan Ibu Ryanjani Lila, S.Pd selaku guru kelas V mengatakan bahwa:

“Dari pihak guru sangat mendukung program literasi ini karena siswa akan terbiasa untuk berangkat pagi dan membaca buku sehingga banyak informasi yang diperoleh siswa. Literasi juga dapat membentuk karakter siswa dalam menghayati pancasila karena sebelum membaca siswa diajak untuk menyanyikan lagu nasional, menghormat bendera, melafalkan pancasila bahkan langsung mengimplementasikannya dengan di dampingi oleh guru.”

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa gerakan literasi dapat bermanfaat bagi siswa dalam meningkatkan pembiasaan karakter dan penghayatan pancasila. Gerakan literasi perlu sinergi dari berbagai pihak, mulai dari siswa, wali murid, guru, kepala sekolah, pengawas, kepala dinas, dan pemerintah sehingga gerakan dapat dilakukan secara sadar sebagai bentuk pembiasaan karakter siswa. Kegiatan Gerakan Literasi Sekolah yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan penghayatan pancasila yakni pelafalan pancasila, sarapan bacaan setiap pagi, sudut-sudut baca sebagai bentuk penumbuhan minat baca, pembiasaan karakter dan penghayatan pancasila. Bahan bacaan yang dipilih pun merupakan bahan bacaan yang dapat meningkatkan penghayatan pancasila seperti bacaan tentang cerita tokoh nasionalisme, budi

pekerti dalam implementasi nilai-nilai pancasila. Dengan membaca bacaan tentang implementasi nilai-nilai pancasila maka siswa akan termotivasi untuk mengimplementasikan pula nilai-nilai pancasila dalam keseharian mereka sehingga penghayatan yang sesungguhnya dapat mereka lakukan dengan baik dan lebih maksimal. Dalam meningkatkan penghayatan pancasila yang paling utama adalah kesadaran dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk gerakan bersama sehingga terbiasa dalam melafalkan dan melaksanakan penghayatan pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Efektivitas Gerakan Literasi Sekolah dalam Upaya Meningkatkan Penghayatan Pancasila Siswa di SD Negeri 03 Karanganyar

Gerakan Literasi Sekolah merupakan suatu kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkembangkan minat baca siswa sehingga siswa gemar membaca secara sadar dan terbiasa dengan demikian karakter anak akan terbentuk dengan kegiatan pembiasaan dalam gerakan literasi sekolah.

Kegiatan literasi dilakukan dengan penuh kesadaran dan dukungan oleh berbagai pihak, terutama siswa, walimurid, guru, kepala sekolah, pengawas, kepala dinas, dan tentunya pemerintah sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Kegiatan ini dikemas semenarik mungkin yang dimulai pukul 06.45 atau 15 menit sebelum jam pertama dimulai. Alasannya karena ketika pagi siswa masih bersemangat dalam belajar sehingga penyerapan informasi dapat berlangsung dengan cepat dan maksimal. Gerakan Literasi Sekolah mempunyai tujuan mengembangkan minat baca siswa serta mendidik siswa untuk memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan jiwa Pancasila.

Jadi, alasan kegiatan Gerakan Literasi Sekolah menjadi program pembiasaan wajib di SD Negeri 03 Karanganyar telah menunjukkan bahwa kegiatan ini sudah sesuai dengan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang pelaksanaan program Literasi Sekolah dengan tujuan menumbuhkembangkan minat baca siswa agar menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan menerapkan budaya literasi pada sekolah yang dijadikan sebagai taman membaca dan meningkatkan keterlibatan seluruh ekosistem sekolah demi kemajuan perkembangan sekolah.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, terdapat peningkatan yang signifikan terhadap sikap penghayatan pancasila melalui Gerakan Literasi Sekolah. Hal ini dapat ditunjukkan dari indikator efektivitas Gerakan Literasi Sekolah dengan menggunakan indikator efektivitas dan indikator pencapaian Gerakan Literasi Sekolah dalam tahap pembiasaan. Adapun indikator

efektivitas Gerakan Literasi Sekolah antara lain:

a. Indikator *Input*

1. Karakteristik guru dalam pembiasaan karakter

Guru berperan dalam menumbuhkembangkan minat membaca siswa melalui motivasi dan penyelenggaraan pembelajaran yang menarik sehingga terjadi proses interaksi belajar yang komunikatif serta menanamkan penghayatan pancasila dalam setiap kegiatan literasi. Saat peneliti melakukan penelitian, ada beberapa guru dengan antusias melaksanakan gerakan literasi ini terlihat dari respon siswa yang cukup meningkat dalam pelaksanaan kegiatan literasi sekolah. Namun, ada juga guru yang tidak melaksanakan Gerakan Literasi Sekolah dengan antusias dan terkesan hanya sekedarnya saja. bahwa peran guru menjadi sentral dalam memotivasi minat siswa dalam membaca dan melakukan penghayatan pancasila. Perlu adanya pemantauan berkala oleh kepala sekolah agar Gerakan Literasi Sekolah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga efektif dan efisien.

2. Fasilitas perlengkapan

Fasilitas Perlengkapan atau sarana dan prasarana dalam kegiatan Gerakan Literasi Sekolah dikatakan kurang maksimal meskipun telah tersedia hanya 60 % selebihnya siswa membawa sendiri dari rumah, karena untuk menunjang praktek kegiatan Gerakan Literasi Sekolah

diperlukan fasilitas yang mendukung seperti ketersediaan bahan bacaan yang beraneka macam sehingga literatur siswa akan bertambah. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak Mardiyatmoko, S.Pd bahwa :

“Belum lama sebenarnya sekolah sudah membeli buku bahan literasi untuk siswa tapi hanya kelas I, II, III, IV sesuai jumlah siswa untuk kelas V dan VI sementara menggunakan buku yang ada di perpustakaan selebihnya siswa membawa sendiri dari rumah demi kelancaran program literasi sekolah.”

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, perlengkapan atau sarana prasarana yang terdapat masih kurang menunjang kegiatan literasi terutama dalam ruang perpustakaan yang tidak dimanfaatkan dengan maksimal meskipun sudah tersedia karena sarana prasarana menjadi sangat penting dalam kegiatan gerakan literasi sekolah.

3. Materi pendidikan.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di sekolah, materi dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah belum dibuat secara terstruktur yang akan dilakukan siswa. Dapat disimpulkan bahwa mengenai materi pendidikan yang menunjang gerakan literasi belum maksimal, sebab belum disusun secara terstruktur dalam kegiatan gerakan literasi sekolah.

b. Indikator Proses

1. Perilaku Administratif

Perilaku administratif merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membantu, melayani, mengarahkan, ataupun mengatur semua kegiatan yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Guru harus mempunyai kemampuan untuk memberikan motivasi kepada siswa untuk gemar membaca dan menghayati pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun belum dilaksanakan secara maksimal oleh semua guru melainkan hanya beberapa guru saja.

2. Alokasi Waktu

Alokasi waktu siswa dalam melaksanakan kegiatan literasi sekolah dirasakan sudah cukup sesuai alokasi waktu yang disarankan Pemerintah hanya saja waktu tersebut tidak efektif karena ada siswa yang datang terlambat dan berbicara sendiri, sehingga waktu menjadi tidak efektif. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa alokasi waktu kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa dan guru.

c. Indikator *Output*

1. Hasil-hasil yang Berhubungan dengan Penghayatan Pancasila

Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah dapat menunjang penghayatan pancasila apabila dilaksanakan dengan maksimal oleh semua pihak sekolah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti diketahui bahwa melalui kegiatan Gerakan Literasi Sekolah untuk meningkatkan penghayatan

pancasila meliputi membaca melalui sudut baca dan pelafalan pancasila sudah terlaksana hanya saja kurang maksimal.

Dalam konteks Gerakan Literasi Sekolah dalam tahap pembiasaan untuk meningkatkan penghayatan pancasila terdapat beberapa indikator yang mengalami peningkatan yakni:

- 1) Ada kegiatan 15 menit membaca meliputi membaca nyaring dan membaca dalam hati. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti diketahui bahwa terjadi peningkatan penghayatan pancasila melalui kegiatan 15 menit membaca dengan menyediakan cerita rakyat atau kisah kepahlawanan pancasila.
- 2) Kegiatan 15 menit membaca dilakukan setiap hari (di awal,tengah, atau menjelang akhir pelajaran). Berdasarkan pengamatan peneliti diketahui bahwa kegiatan membaca sudah dilaksanakan pada pukul 06.45-07.00.
- 3) Buku yang dibacakan kepada atau dibaca oleh peserta didik dicatat judul dan nama pengarangnya dalam catatan harian. Berdasarkan pengamatan, siswa sudah mencatat dalam catatan harian yang dimiliki oleh masing-masing siswa.
- 4) Guru, kepala sekolah,dan tenaga kependidikan lain terlibat dalam kegiatan 15 menit dengan membacakan buku atau ikut membaca dalam hati. Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa penggerak kegiatan literasi sekolah dengan penghayatan pancasila adalah kepala sekolah yang diteruskan oleh guru.
- 5) Ada perpustakaan sekolah atau ruangan khusus untuk menyimpan buku non-pelajaran. Berdasarkan pengamatan, perpustakaan telah ada namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
- 6) Ada Sudut Baca Kelas di tiap kelas dengan koleksi buku nonpelajaran. Berdasarkan pengamatan sudah tersedia sudut baca namun hanya di kelas I, II, III, IV sedangkan di kelas V dan VI karena ruangan kurang mendukung sehingga sudut baca difokuskan di perpustakaan.
- 7) Ada poster-poster kampanye membaca di kelas, koridor, dan area lain di sekolah. Berdasarkan pengamatan, poster yang tersedia sudah cukup untuk mengajak siswa gemar membaca yang dipasang di tiap kelas dan perpustakaan.
- 8) Ada bahan kaya teks di tiap kelas. Berdasarkan pengamatan, tiap kelas disediakan bahan cerita yang kemudian diceritakan sendiri oleh siswa.

- 9) Kebun sekolah, kantin, dan UKS menjadi lingkungan yang kaya literasi. Terdapat posterposter tentang pembiasaan hidup sehat, kebersihan, dan keindahan di kebun sekolah, Kantin, dan UKS. Makanan di kantin sekolah diolah dengan bersih dan sehat. Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa karena lingkungan sekolah yang kurang luas menyebabkan kekurangan ruangan terutama ruang UKS. Kebun sekolah hanya ada di halaman sekolah dan kantin di belakang ruang kelas, sudah ada beberapa poster yang cukup menunjang.
- 10) Sekolah berupaya untuk melibatkan publik (orang tua, alumni, dan elemen masyarakat lain) untuk mengembangkan kegiatan literasi sekolah. Pelibatan publik dilakukan dengan adanya pemantauan bersama oleh sekolah dan orang tua siswa dengan laporan pada tiap bulan mengenai pelaksanaan literasi dan sikap yang telah dilakukan oleh siswa sehingga ada peningkatan perubahan sikap siswa yang senantiasa terpantau.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan dan

analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah. Adapun kesimpulan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Gerakan Literasi Sekolah yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan penghayatan pancasila pada siswa SD Negeri 03 Karanganyar antara lain:
 - a. Pelafalan pancasila
 - b. Sarapan bacaan setiap pagi
 - c. Sudut-sudut baca sebagai bentuk penumbuhan minat baca, pembiasaan karakter dan penghayatan pancasila.
2. Efektivitas Gerakan Literasi Sekolah yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan penghayatan pancasila pada siswa SD Negeri 03 Karanganyar belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari:
 - a. Indikator *input* meliputi:
 - 1) Karakteristik guru dalam pembiasaan karakter
Perlu pemantauan berkala kepala sekolah agar Gerakan Literasi Sekolah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga efektif dan efisien.
 - 2) Fasilitas Perlengkapan
Fasilitas perlengkapan atau sarana dan prasarana dalam Gerakan Literasi Sekolah yang disediakan sekolah masih belum maksimal dalam menunjang kegiatan Gerakan Literasi Sekolah karena hanya tersedia 60%..
 - 3) Materi Pendidikan

Materi pendidikan yang menunjang gerakan literasi belum maksimal, sebab belum disusun secara terprogram dan terstruktur.

b. Indikator *process* meliputi:

1) Perilaku Administratif

Guru harus mempunyai kemampuan untuk memberikan motivasi kepada siswa untuk gemar membaca dan menghayati pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun belum dilaksanakan secara maksimal oleh semua guru melainkan hanya beberapa guru saja.

2) Alokasi Waktu

Alokasi waktu dirasakan sudah cukup sesuai alokasi waktu yang disarankan Pemerintah hanya saja waktu tersebut tidak efektif karena ada siswa yang datang terlambat dan berbicara sendiri, sehingga waktu menjadi tidak efektif.

c. Indikator *output* meliputi:

1) Hasil-hasil yang Berhubungan dengan Penghayatan Pancasila

Hasil yang berhubungan meliputi membaca melalui sudut baca dan pelafalan pancasila sudah terlaksana hanya saja kurang maksimal.

Dalam konteks Gerakan Literasi Sekolah tahap pembiasaan indikator keberhasilan mengalami peningkatan meliputi ada kegiatan 15 menit membaca, 15 menit membaca dilakukan setiap hari, Buku yang dibacakan

kepada atau dibaca oleh peserta didik dicatat judul dan nama pengarangnya dalam catatan harian, tenaga kependidikan lain terlibat dalam kegiatan, perpustakaan sekolah, ada Sudut Baca Kelas, ada poster-poster kampanye membaca di kelas, koridor, dan area lain di sekolah, ada bahan kaya teks di tiap kelas, Kebun sekolah, kantin, dan UKS menjadi lingkungan yang kaya literasi. Sekolah berupaya untuk melibatkan publik (orang tua, alumni, dan elemen masyarakat lain) untuk mengembangkan kegiatan literasi sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Noor Ms. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Beers, C. S., Beers, J. W., & Smith, J. O. (2009). A Principal's Guide to Literacy Instruction. New York: Guilford Press.
- Budimansyah, Dasim. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter*. Bandung: Widya Aksara Press
- Faizah, Dewi Utama dkk. 2016. Panduan Gerakan Literasi di Sekolah Dasar.

- Jakarta:
Kemendikbud.
- Hidayatullah, Furqon. (2010). *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka
- Margono. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Masnur, Muslich. (2011). *Melaksanakan PTK itu mudah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyasa, E. (2005). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. (2008). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta
- Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Gerakan Literasi Sekolah
- Septiani. 2014. dalam *repository.usu.ac.id/bitstream/Chapter%20I.pdf* diakses pada 20 Desember 2016
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Winarno. 2013. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wuryandani & Faturrohman. 2012. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

PENERAPAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI SDN JATITENGAH 1 SUKODONO SRAGEN

Kukuh Prasetya Arief Wicaksana

Prodi S2 PGSD Pascasarjana UNS

Email: kukuhprasetya@student.uns.ac.id

ABSTRACT. Education is an important part in improving the quality and the quality of a person. Moreover, education has the function and role to develop and prepare human resources and to establish a person's character is just, fair, democratic and virtuous character who contribute to their community and Negara. Tujuan research to determine the application of democratic values in the learning process in SDN Jatitengah 1 Sukodono Sragen. The research method is qualitative descriptive, data collection methods used: interviews, observation, and documentation. The results of the study of teachers and students are already implementing democratic values such as freedom of participation, gender equality, sovereignty, confidence and cooperation. In addition, there is also the implementation of democratic values are not applied to such freedom groups. The conclusion, teachers and students have applied five democratic values and did not make a democracy.

Keywords: Values, Democracy & Learning

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam peningkatan mutu dan kualitas seseorang. Melalui pendidikan seseorang akan diarahkan untuk belajar serta meningkatkan potensi yang dimiliki, dengan begitu seseorang yang berpendidikan akan menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang-orang disekitarnya, adapun pendidikan didapat dari lembaga

formal (sekolah) maupun non formal (lingkungan sekitar/masyarakat).

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang dan sangat berguna bagi manusia. Walaupun dalam prosesnya memerlukan usaha dan waktu yang tidak sedikit. Menurut Slameto (2010:1), kegiatan belajar merupakan kegiatan paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik

Pendidikan mempunyai fungsi dan peran untuk mengembangkan dan menyiapkan sumberdaya manusia serta membentuk watak seseorang yang adil, jujur, demokratis, dan berbudi pekerti yang berguna bagi masyarakat dan Negara. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia diperlukan tenaga guru yang ahli dan profesional serta memiliki dedikasi dan sistem yang baik. "Demokrasi di Indonesia merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dalam suatu negara. Sistem pemerintahan demokrasi dijalankan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara" (Avianto, 2013). Pendidikan demokrasi diperlukan dalam rangka proses demokratisasi, yaitu perluasan

fungsi dan optimalisasi peran aktif dari warga negara yang harus dilakukan dengan cerdas dan baik dalam membangun masyarakat yang benar-benar demokratis sesuai dengan konteks negaranya.

Gagasan demokratisasi sekarang telah dikembangkan pada proses pendidikan. Demokratisasi saat ini melibatkan siswa yang tidak hanya sebagai seorang yang aktif dalam pembelajaran antarguru dan siswa, tetapi juga antarsiswa. Dengan demikian, siswa dapat berperan aktif dalam berkelompok berdiskusi saling beradu argumen dan menghargai pendapat dari orang lain. Aktivitas tersebut merupakan tindakan yang positif antara karakter berdemokratisasi dengan hasil belajar peserta didik. Namun, dalam prosesnya terlihat kecenderungan siswa belum secara totalitas dikembangkan secara berdemokratisasi.

SD Negeri Jatitengah 1 Sukodono Sragen dalam proses pembelajaran terlihat normal, yaitu guru menerangkan dan siswa memperhatikan. Namun, tidak serta merta proses pembelajaran berlangsung secara ideal karena dalam proses pembelajaran terlihat guru lebih mendominasi pembelajaran. Selain itu, peran peserta didik yang terjadi pada proses pembelajaran kelompok tidak merata dalam mengemukakan pendapat. Hal tersebut terlihat peserta didik pintar mendominasi dalam kelompok, sedangkan peserta didik yang lain hanya titip

nama dalam berkelompok. Dengan demikian, menanamkan pendidikan demokrasi seawal mungkin dapat membantu guru dan peserta didik dalam menempatkan diri sesuai dengan keadaan yang dihadapi.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat pentingnya demokrasi dalam pendidikan bahkan demokratis termasuk ke dalam 18 karakter yang ditentukan oleh Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional. Karakter demokratis meliputi cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Penanaman nilai-nilai demokrasi di Sekolah Dasar penting karena akan memengaruhi sikap dan perilaku pada siswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif. "Riset kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan riset yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami" (Ali & Asrori, 2014: 121). Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dalam arti hanya mendiskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh pelaku riset, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Proses penelitian dilaksanakan di kelas VI SD Negeri Jatitengah 1 Sukodono Sragen, adapun metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

"Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu" (Sugiyono, 2010: 317). "Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan" (Tanzeh, 2011: 89). Berdasarkan urian diatas dapat disimpulkan wawancara adalah pertemuan yang dilakukan antar dua orang atau lebih yang dilakukan dengan cara tatap muka antara pewawancara dan terwawancara guna mendapatkan informasi.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data guna mengumpulkan informasi permasalahan yang akan diteliti, tetapi juga dapat digunakan sebagai teknik mengumpulkan informasi untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Jenis wawancara ada dua yang lazim digunakan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur.

Peneliti selama penelitian menggunakan salah satu metode wawancara tak berstruktur karena wawancara yang dilakukan dengan tidak secara ketat telah ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, urutan, dan materi pertanyaannya.

Dengan demikian, ketika melaksanakan wawancara akan lebih fleksibel karena materi pertanyaan dapat dikembangkan saat proses wawancara berlangsung.

2. Observasi

“Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan pshikhologis” (Sutrisno dalam Sugiyono, 2010: 203), “observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek pengukuran” (Widoyoko, 2014: 64). “Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Margono dalam Tanzeh, 2011: 84). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti baik berupa kenyataan lapangan yang ada.

3. Dokumentasi

“Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang” (Sugiyono, 2010:329). “Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia” (Tanzeh, 2011: 92). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan dokumentasi adalah kumpulan data baik berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya. Alasan dokumentasi dijadikan sebagai data untuk membuktikan penelitian karena dokumen merupakan sumber yang setabil, dapat berguna sebagai bukti untuk pengujian, mempunyai sifat yang alamiah, tidak reaktif.

Dengan demikian, mudah ditemukan dengan teknik kajian isi. Selain itu, hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pendidikan nilai dimaknai sebagai:

- 1) Penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang
- 2) Bantuan terhadap peserta didik, agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta penempatan secara integral dalam keseluruhan hidupnya
- 3) Pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan, melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten (Mulyana dalam Aryani & Susatim, 2010)

“Demokrasi merupakan gagasan/pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warganegara” (Sihono, 2011).

Nilai-nilai yang diajarkan dalam berdemokrasi meliputi: kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya dan kerjasama (Hassan, dkk, 2007:76).

Pembelajaran adalah proses terjadinya interaksi kegiatan belajar antara peserta didik,

pendidik dan sumber belajar. Selain itu, sukses tidaknya proses pembelajaran dipengaruhi beberapa faktor: a) Pendidik, b) Peserta didik, c) Model pembelajaran, d) Lingkungan.

Pembahasan

Demokrasi membangun kondisi agar setiap warga mampu menyuarakan pendapatnya. Nilai-nilai demokrasi dalam dunia pendidikan meliputi: kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya dan kerjasama (Hassan, dkk, 2007:76)

1. Kebebasan Berkelompok

Kehidupan berkelompok merupakan naluri dasar manusia. Hal tersebut tidak dipungkiri dalam keseharian manusia selalu berhubungan dengan yang lain dalam suatu wadah baik dalam masyarakat-masyarakat, organisasi, dan lain-lain. Kelas VI SDN Jatitengah 1 Sukodono, Sragen, terlihat hubungan dalam berkelompok. Penerapan yang dilakukan guru dan siswa sebagai berikut:

- a. Guru membagi siswa dalam kelas menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 atau 4 siswa yang dipilih berdasarkan kemampuan siswa, dan dibagi semerata mungkin.
- b. Siswa berkumpul bersama anggota kelompok yang telah ditentukan.

Berdasarkan praktik yang terlihat dalam pembelajaran, guru dan siswa belum melakukan

tindakan yang mencerminkan kebebasan berkelompok. Hal tersebut karena guru yang menentukan anggota tiap kelompok dan siswa hanya menuruti ketentuan yang sudah dibuat guru, dari sesi wawancara terhadap guru. Peneliti mendapatkan informasi mengapa siswa tidak diberi kesempatan untuk memilih anggota kelompoknya dikarenakan untuk membentuk kelompok yang sama rata kemampuannya antar kelompok satu dengan yang lain, sehingga akan adil.

2. Kebebasan Berpartisipasi.

Kebebasan ini sesungguhnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Kelas VI SDN Jatitengah 1 Sukodono, Sragen, terlihat hubungan dalam kebebasan berpartisipasi. Penerapan yang dilakukan guru dan siswa sebagai berikut:

- a. Guru dalam proses pembelajaran terlihat selalu memberikan kebebasan terhadap siswa untuk bertanya, baik yang berkaitan dengan materi pelajaran, maupun hanya sekedar mengomentari pendapat baik dari guru ataupun siswa yang lain. Selain itu, pemilihan struktur organisasi dalam kelas guru juga memberikan kesempatan pada siswa untuk menunjuk seorang teman ataupun diri sendiri untuk mencalonkan diri sebagai bagian dari struktur organisasi dalam kelas
- b. Siswa dapat mengikuti proses pembelajaran, serta siswa

dapat bertanya baik kepada guru maupun siswa ataupun kelompok yang lain. Selain itu, siswa tidak perlu takut salah dalam menyampaikan argumennya karena adanya kebebasan siswa dalam menjawab pertanyaan. Selain itu, siswa diberi kesempatan untuk dapat menjadi bagian dari struktur organisasi dalam kelas.

Kebebasan berpartisipasi sudah terlihat dalam proses pembelajaran, yaitu pihak guru memberikan kebebasan terhadap peserta didik untuk mengutarakan pendapat dan memberikan kebebasan dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran baik, berkomentar, bertanya, menjawab maupun mengikuti proses pemilihan struktur organisasi dalam kelas.

3. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan sebuah keniscayaan demokrasi, yaitu kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang sama sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, demokrasi tanpa kesetaraan gender akan berdampak pada ketidakadilan sosial (Hassan, dkk, 2007:77). Kelas VI SDN Jatitengah 1 Sukodono, Sragen, terlihat proses keadilan, yaitu antarsiswa laki-laki, maupun perempuan memiliki hak yang sama. Penerapan yang dilakukan guru dan siswa sebagai berikut:

a. Guru tidak membeda bedakan antarlaki-laki maupun perempuan. Hal tersebut

terlihat dari proses pembelajaran, semua siswa diberikan hak yang sama berpartisipasi dalam proses pembelajaran maupun dalam proses pemilihan struktur organisasi.

b. Siswa terlihat menerapkan nilai-nilai demokrasi di antaranya kesetaraan gender. Hal tersebut terlihat dari proses pergaulan siswa yang tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan

Berdasarkan pengamatan, guru dan siswa sudah tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan baik dari pergaulan maupun dalam proses pembelajaran.

4. Kedaulatan Rakyat

Demokrasi didirikan berdasarkan kedaulatan rakyat. Esensi kedaulatan adalah penciptaan otorisasi dan penegakan hukum sesuai dengan standar persyaratan kebaikan umum (Hassan, dkk, 2007:77). Proses pembelajaran yang berdemokrasi tidak akan terlepas dari struktur organisasi dan peraturan yang dibuat guna kelancaran serta kebaikan dalam mengatur keadaan kelas, struktur organisasi yang dibentuk ini memiliki otoritas untuk mengatur kebaikan dalam kelas, dan tidak hanya penyusunan struktur organisasi peraturan-peraturan didalam kelaspun wajib dibentuk guna membentuk ketertipan.

Kelas VI SD Negeri Jatitengah 1 Sukodono, Sragen, terlihat hubungan dalam kedaulatan rakyat. Penerapan yang dilakukan guru dan siswa sebagai berikut:

- a. Guru diawal semester melakukan pembuatan struktur organisasi dan peraturan dalam kelas. Guru dalam pembuatannya melibatkan siswa guna mendapatkan kesepakatan bersama.
- b. Siswa ikut berperan dalam pembentukan struktur organisasi dalam bentuk menyampaikan pendapat siapa yang dipilih. Selanjutnya, siswa membentuk peraturan dalam kelas, termasuk pembuatan regu piket agar kelas tertib.

Penyusunan organisasi dan peraturan kelas yang dibuat secara kesepakatan bersama baik dari siswa dan juga guru terlihat siswa mengaplikasikannya dengan semestinya. Salah satu contoh siswa yang piket pada hari itu, yaitu melaksanakan tugasnya dengan semestinya dan ketua kelas yang mempersiapkan teman-temannya dalam mengikuti pelajaran.

5. Rasa Percaya

Demokrasi dalam suatu kelas akan sulit berkembang apa bila rasa saling percaya pada tiap individu tidak tumbuh, jika yang ada hanya rasa takut, khawatir, curiga dan permusuhan maka hubungan pada tiap individu akan terganggu. Kondisi seperti ini akan mengakibatkan kerugian pada sistem sosial dalam kelas. Kelas VI SD Negeri Jatitengah 1 Sukodono, Sragen, terlihat hubungan dalam rasa saling percaya antar individu. Penerapan yang dilakukan guru dan siswa sebagai berikut:

- a. Guru dalam kegiatan pembelajaran juga

memperlihatkan rasa saling percaya kepada seluruh siswa, seperti guru membagi siswa dalam kelas menjadi beberapa kelompok. Kemudian, setiap kelompok diharapkan seluruhnya ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, pembentukan struktur organisasi dalam kelas yang mengajak seluruh siswa kelas VI untuk bermusawarah menentukan pilihannya juga merupakan salah satu bentuk contoh rasa saling percaya.

- b. Siswa dalam pembelajaran memperlihatkan rasa saling percaya pada kegiatan berkelompok. Setiap anggota kelompok saling memberi masukan guna menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, ditunjuknya salah satu anggota kelompok untuk menyampaikan hasil pekerjaan kelompok di depan kelas merupakan salah satu bentuk rasa saling percaya pada tiap individu. Seluruh siswa kelas VI rasa saling percaya juga dapat terlihat pada struktur organisasinya, yaitu setiap jabatan yang diperoleh siswa dipercayai oleh seluruh anggota kelas untuk mengembannya.

Rasa saling percaya pada guru dan siswa kelas VI sudah terlihat pada proses pembelajaran baik antar individu maupun antar kelompok.

6. Kerjasama

Demokrasi tidak akan berjalan apabila tidak ada kerjasama dalam prosesnya. Kerjasama bukan berarti menutup munculnya

perbedaan pendapat antar individu dan antar kelompok karena tanpa perbedaan demokrasi tidak akan dapat berkembang. Perbedaan inilah yang dapat mendorong setiap kelompok untuk bersaing agar mencapai tujuan yang lebih baik. Kelas VI SD Negeri Jatitengah 1 Sukodono, Sragen, terlihat hubungan dalam bekerjasama. Penerapan yang dilakukan guru dan siswa sebagai berikut:

- a. Guru dalam mengaplikasikan unsur kerjasama dalam proses pembelajaran dapat terlihat pada penggunaan strategi pembelajaran secara berkelompok. Siswa dalam kelompok-kelompok terlihat sesi diskusi guna mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan diskusi pasti tidak bisa dilakukan secara sendiri. Hubungan kerjasama dapat terlihat dalam sesi diskusi antar individu dalam kelompok.
- b. Siswa menerapkan tindakan saling bekerjasama dapat terlihat dari berbagai kegiatan, seperti saat diskusi kelompok terlihat siswa saling bantu membantu dalam menyelesaikan soal. Selain itu, siswa juga memberikan masukan tidak hanya pada kelompok masing-masing akan tetapi juga memberikan masukan terhadap kelompok lawan.

Upaya kerjasama yang sudah dilakukan oleh guru dan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung sudah terlihat dan saling melengkapi.

PENUTUP

Simpulan

Demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan" (Ubaedillah, 2015:82). Pendidikan demokratis adalah upaya sistematis yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan peranannya dalam masyarakat" (Arwiyah & Machfiroh, 2014:74). Nilai-nilai demokrasi dalam dunia pendidikan meliputi: kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya dan kerjasama (Hassan, dkk, 2007:76).

Upaya yang sudah dilakukan oleh guru dan siswa dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi di kelas VI SD Negeri Jatitengah 1 Sukodono Sragen

1. Kebebasan berpartisipasi sudah terlihat dalam proses pembelajaran. Pihak guru memberikan kebebasan terhadap peserta didik untuk mengutarakan pendapat dan memberikan kebebasan dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran baik, berkomentar, bertanya, menjawab maupun mengikuti proses pemilihan struktur organisasi dalam kelas.

2. Kesetaraan gender terlihat guru dan siswa sudah sama-sama tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan baik dari pergaulan maupun dalam proses pembelajaran.
3. Kedaulatan rakyat berdasarkan penyusunan organisasi dan peraturan kelas yang dibuat secara kesepakatan bersama baik dari siswa dan juga guru, terlihat siswa mengaplikasikannya dengan semestinya. Salah satu contoh siswa yang piket pada hari itu melaksanakan tugasnya dengan semestinya dan ketua kelas yang mempersiapkan teman-temannya dalam mengikuti pelajaran.
4. Rasa percaya. Rasa saling percaya pada guru dan siswa kelas VI sudah terlihat pada proses pembelajaran baik antar individu maupun antar kelompok.
5. Kerjasama. Upaya kerjasama yang sudah dilakukan oleh guru dan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung sudah terlihat dan saling melengkapi, seperti guru menggunakan strategi berkelompok dan juga saat siswa berkelompok melakukan sesi diskusi dimana tiap siswa saling memberikan masukan terhadap kelompok. Tidak hanya kelompok sendiri akan tetapi juga pada kelompok lawan.

Salah satu nilai-nilai demokrasi yang tidak diterapkan dalam proses pembelajaran adalah penerapan kebebasan

berkelompok. Berdasarkan praktik yang terlihat dalam pembelajaran guru dan siswa belum melakukan tindakan yang mencerminkan kebebasan berkelompok. Hal tersebut karena guru yang menentukan anggota tiap kelompok dan siswa hanya menuruti ketentuan yang sudah dibuat guru, dari sesi wawancara terhadap guru, peneliti mendapati informasi mengapa siswa tidak diberi kesempatan untuk memilih anggota kelompoknya dikarenakan untuk membentuk kelompok yang sama rata kemampuannya antar kelompok satu dengan yang lain sehingga akan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwiyah M, Y & Machfiroh R. (2014). *Civic Education di Perguruan Tinggi Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Aryani I, K & Susatim M. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Avianto Sigit. (2013). *Jurnal: Penanaman Nilai Demokrasi Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sihono Teguh. (2011). *Jurnal Volume 8 nomor 1: Upaya menuju demokratisasi pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*

- Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*
Bandung: Alfabeta.
- Suryono Hassan, dkk. (2007).
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.
Surakarta: UPT
Penerbitan dan
Pencetakan UNS (UNS
Press).
- Tanzeh Ahmad. (2011).
Metoddologi Penelitian Praktis. Yogyakarta:
Sukses.
- Triyanto, Kwartarini W. R., &
Retnowati S. (2010).
Inovasi Pembelajaran Pancasila di Perguruan Tinggi. Surakarta: UNS
Press.
- Ubaedillah A. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education Pancasila Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi.*
Jakarta: Prenadamedia
Group.
- Widoyoko E, P. (2014). *Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah.* Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
- Winton Sue. (2010). *Jurnal Volume 114: Democracy In Education Through Community-Based Policy Dialogues.* New York:
University at Buffalo

PENGARUH INTERAKSI GURU DAN SISWA UNTUK MENINGKATKAN KEBEBASAN BERPENDAPAT SISWA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Meilan Tri Wuryani

SD N Mangkubumen Kulon 83 Surakarta

Email: memey_mutsy@yahoo.com

Abstract: *The objective of this research is to know the interaction teachers and students to improve free speech students in learning citizenship education of the students in Grade IV of State Primary School Mangkubumen Kulon 83 of Laweyan Sub-district, Surakarta city. This research used qualitative research descriptive. The data of the research were gathered through observation, in-depth interview, and documentation. The results of research carried out can be concluded that interaction teachers and students can increase free speech students in learning citizenship education. This increase evidenced by increase in the number of students who dares said his opinion when follow lessons. The increased number of students the namely to increase the first 16 % (4 students), an increase in second 36 % (9 students), and the increase in third 28 % (7 students).*

Keywords: *interaction, free speech, lerning citizenship education*

PENDAHULUAN

Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan termasuk komponen internal yang mempunyai pengaruh besar dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa dan merupakan penunjang

keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar siswa memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan (Tim KTSP, 2007: 71). Melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa diarahkan, dibimbing, dan

dibantu untuk menjadi warga Negara yang mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan ide atau gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan pengetahuannya tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang ada pada dirinya.

Dalam bagian penjelasan undang-undang dinyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks undang-undang tersebut merupakan nama jenis, bukan sebagai nama diri atau nama mata pelajaran. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka berdasar Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, pendidikan kewarganegaraan di sekolah dilaukan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi di masyarakat. Melalui proses belajar mengajar dapat tercipta sebuah interaksi yang bernilai normatif. Belajar mengajar adalah suatu proses yang dilakukan dengan sadar dan bertujuan. Tujuan adalah sebagai pedoman ke arah manaakan dibawa proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar akan berhasil bila hasilnya mampu membawa

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap-sikap dalam diri siswa.

Interaksi dalam proses belajar mengajar pastilah sangat penting perannya, tetapi dalam kenyataanya saat terjadi proses belajar mengajar interaksi yang terjadi hanyalah satu arah, yaitu dari guru. Siswa kebanyakan hanya diam dan tidak leluasa dalam mengikuti pelajaran. Siswa pasif seakan takut dalam mengemukakan pendapatnya. Padahal keberhasilan tujuan pembelajaran sangatlah ditentukan dengan adanya interaksi antara guru dan siswa (Rovik Karsidi, 2008: 68).

Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti interkasi yang terjadi antara guru dan siswa mempengaruhi kebebasan berpendapat dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dirasa Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk membentuk karakter siswa dalam lingkup sikap, moral dan nilai-nilai menjdi warga negara yang baik untuk mempersiapkan siswa menjadi generasi penerus bangsa yang diharapkan demi perbaikan bangsa dan negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Penelitian deskriptif dapat berkenaan dengan kasus-

kasus tertentu atau suatu populasi yang cukup luas. Dapat dilakukan pada saat ini atau dalam kurun waktu yang singkat, serta dapat dilakukan dalam waktu yang cukup lama (Sukmadinata, 2013: 18).

Sedangkan desain penelitian yang digunakan berupa fenomenologi. Dalam fenomenologi pokok kajian yang tampak dijadikan sebagai subjek penelitian, akan tetapi terbebas dari subjektivitas peneliti. Kemudian peneliti mereduksi dan memurnikan sehingga didapat gambaran fenomena yang sesungguhnya. Selain itu, dalam penelitian fenomenologi fokus pada kegiatan menggali, memahami dan menafsirkan arti fenomena, peristiwa dan hubungannya dengan orang-orang dalam situasi tertentu. (Yusuf, 2014: 351).

Penelitian ini dilakukan di SDN Mangkubumen Kulon No. 83 Surakarta yang berlokasi di Jl. Sinuhun No. 25 Yosoroto, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Lokasi sekolah sangat strategis yaitu di tengah kota dan dekat dengan jalan. Peneliti melakukan penelitian di sekolah ini dengan alasan sekolah ini memiliki permasalahan dalam interaksi antara guru dan siswa yang kurang intensif sehingga membuat siswa kurang antusias dalam mengemukakan pendapatnya saat pelajaran berlangsung.

Kegiatan ini dilaksanakan pada semester 1 tahun ajaran 2016/2017 selama 6 minggu

(1bulan lebih 2 minggu) pada bulan November sampai Desember. Dengan rincian kegiatan wawancara pada guru dan siswa dilakukan pada minggu pertama, lalu observasi dan dokumentasi pembelajaran dilakukan sebanyak 4 pertemuan pada minggu kedua sampai minggu kelima. Dan pada minggu ketujuh peneliti melakukan penyusunan pelaporan.

Penelitian ini bersifat kolaboratif dan partisipatif dalam mengumpulkan data. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan data seobjektif mungkin. Upaya yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data dilaksanakan dengan beberapa teknik yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengetahui perilaku-perilaku siswa melalui pengamatan, misalnya pengamatan kondisi dan interaksi belajar mengajar (Arikunto, 2010: 199). Dalam hal ini, observasi dilakukan terhadap aktivitas kebebasan berpendapat siswa tentang tugas yang diberikan guru, sikap positif dan negatif terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Selain siswa, peneliti juga mengobservasi langsung interaksi yang dilakukan guru kelas IV SD Negeri Mangkubumen Kulon No. 83 Surakarta terutama dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Wawancara

Menurut Arikunto (2010: 198), wawancara adalah suatu metode

penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dan responden. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan responden yang berhasil dan yang kurang berhasil dalam menjawab soal-soal. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan teknik terstruktur. Wawancara dilakukan kepada siswa dan guru kelas IV SD Negeri Mangkubumen Kulon No. 83 Surakarta untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan interaksi antara guru dan siswa, kebebasan siswa dalam mengikuti pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang cukup penting sebagai bukti terjadinya suatu kegiatan dalam hal ini proses pembelajaran (Arikunto, 2010: 201). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi silabus dan RPP Pendidikan Kewarganegaraan serta dokumentasi foto dan video saat tindakan penelitian dilaksanakan. Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh rekaman aktivitas siswa selama mengikuti proses pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam pembelajaran interaksi sering berlangsung antara guru

dan siswa, interaksi tersebut sering dikenal dengan sebutan interaksi edukatif, Interaksi yang berlangsung di sekitar kehidupan manusia dapat diubah menjadi "interaksi yang bernilai edukatif", yakni interaksi dengan sadar meletakkan tujuan untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan seseorang. Interaksi yang bernilai pendidikan ini dalam dunia pendidikan disebut sebagai "interaksi edukatif" (Rovik Karsidi, 2008: 75)

Interaksi edukatif harus menggambarkan hubungan anaktif dua arah dengan sejumlah pengetahuan sebagai mediumnya, sehingga interaksi itu merupakan hubungan yang bermakna dan kreatif. Semua unsur interaksi edukatif harus berproses dalam ikatan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan anaktif dua arah antara guru dan siswa yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan.

Proses interaksi edukatif adalah suatu proses yang mengandung sejumlah norma. Semua norma itulah yang harus guru transfer kepada siswa. Oleh karena itu, wajarlah bila interaksi edukatif tidak berproses dalam kehampaan, tetapi dalam penuh makna. Interaksi edukatif sebagai jembatan yang menghidupkan persenyawaan antara pengetahuan dan perbuatan, yang mengantarkan kepada tingkah laku sesuai dengan pengetahuan yang diterima siswa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa

interaksi edukatif adalah hubungan dua arah antara guru dan siswa dengan sejumlah norma sebagai mediumnya untuk mencapai tujuan pendidikan.

Situasi pengajaran atau proses interaksi belajar mengajar terjadi dalam berbagai pola komunikasi di atas, akan tetapi komunikasi sebagai transaksi yang dianggap sesuai untuk mengaktifkan potensi siswa/murid bisa jadi sangat tergantung situasi dan kebutuhan yang dikembangkan oleh guru, atau bisa jadi merupakan gabungan dari banyak pola interaksi yang ada.

Kebebasan berpendapat sangat dihargai di dalam demokrasi, karena kebebasan berpendapat ini merupakan hak setiap warga negara. Setiap warga negara dijamin hak-haknya untuk menyuarakan aspirasi dan gagasannya melalui berbagai saluran publik, seperti media massa, buku, karya seni, maupun melalui wakil-wakil rakyat di parlemen. Penindasan terhadap kebebasan berpendapat akan menyebabkan negara menjadi represif dan tidak dapat dikontrol sehingga negara akan sangat mudah melakukan pelanggaran HAM, akibatnya demokrasi akan mati. Jadi membangun kondisi agar setiap warga negara mampu menyuarakan pendapatnya (Sri Haryati, 2009:111).

Dukungan guru untuk menunjang kebebasan berpendapat siswa dapat dilakukan dengan pembelajaran yang sifatnya tidak otoriter. Dengan tujuan siswa tidak merasa takut atau canggung

dalam mengungkapkan pendapatnya. sehingga komunikasi atau interaksi guru kepada siswa harus dibuat lebih intensif dan guru lebih dekat dengan siswanya. Selain itu, guru juga haruslah mempersiapkan pembelajaran yang tepat baik dengan strategi, model, metode dan media dalam pembelajaran agar siswa lebih tertarik menemukan pendapatnya di depan umum.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pembelajaran yang tidak hanya sosok program pola Kegiatan Belajar Mengajar yang mengacu pada aspek kognitif saja, melainkan secara utuh dan menyeluruh mencakup aspek afektif dan psikomotor. Selain aspek-aspek tersebut Pendidikan Kewarganegaraan juga mengembangkan pendidikan nilai.

Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dalam 4 kali observasi, setiap kali ada jadwal pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas IV SDN Mangkubumen Kulon No. 83 Surakarta.

Pada observasi pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Semua kegiatan dilakukan oleh guru. Siswa hanya mendengarkan dan mengamati materi pelajaran. Saat diminta berpendapat atau bertanya siswa diam saja dan hanya 2 siswa dari 25 siswa yang mengangkat tangan untuk bertanya. Kebebasan berpendapat siswa hanya terlihat 8%.

Pada observasi kedua, guru sudah melakukan interaksi kepada siswa dengan memberikan petunjuk kepada siswa dan membimbing siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Awalnya siswa berpendapat secara kelompok dan sudah mulai terlihat berani berpendapat. Jumlah siswa yang berani berpendapat pada observasi yang kedua ini ada 6 siswa atau sekitar 24% dari keseluruhan siswa.

Interaksi guru dan siswa dilakukan lebih intensif lagi pada pertemuan ketiga dengan cara penyusunan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi yang tepat yaitu dengan menambahkan kegiatan siswa menanggapi sebuah peristiwa secara individu. Dalam observasi ketiga ini jumlah siswa yang mau mengemukakan pendapatnya melebihi target yaitu ada 15 siswa atau sekitar 60% dari jumlah keseluruhan. Untuk menguatkan penelitian yang peneliti lakukan pada pertemuan ke empat, interaksi guru semakin diintensifkan lagi dengan cara pendekatan antara guru dengan siswa layaknya teman. Dengan tujuan siswa tidak canggung dan lebih bebas serta leluasa saat mengeluarkan pendapatnya.

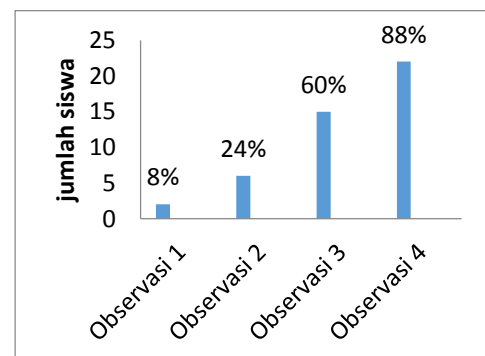
Selain interaksi yang dilakukan lebih intensif, guru juga menyiapkan media pembelajaran yang tepat pula agar siswa lebih termotivasi lagi dalam mengemukakan pendapatnya saat pelajaran berlangsung. Dan akhirnya pada observasi ke

empat ini, siswa sudah merasa bebas dalam mengemukakan pendapatnya. Sehingga jumlah siswa yang berani mengemukakan pendapatnya melebihi target yaitu 22 siswa, sekitar 88%. Sedangkan masih ada 3 anak atau 12% yang masih malu dan belum bebas dalam mengemukakan pendapatnya.

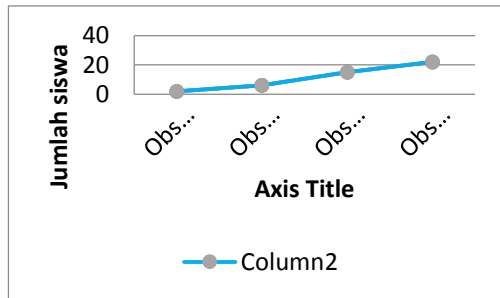
Berikut adalah table hasil observasi tentang pengaruh interaksi guru dan siswa dalam meningkatkan kebebasan berpendapat siswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan:

No	Observasi	Jumlah siswa berpendapat	Prosentase
1	Pertama	2	8%
2	Kedua	6	24%
3	Ketiga	15	60%
4	Keempat	22	88%

Jika disajikan dalam bentuk diagram, maka hasil penelitian ini sebagai berikut:



Untuk memperjelas peningkatan kebebasan berpendapat siswa dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa interaksi guru dan siswa mempengaruhi kebebasan berpendapat siswa. Setiap observasi dengan intensitas interaksi yang meningkat, siswa yang berani dan bebas mengungkapkan pendapatnya juga semakin meningkat. Dengan peningkatan dalam setiap observasinya yaitu peningkatan pertama 16 % (4 siswa), peningkatan kedua 36% (9 siswa), dan peningkatan ketiga 28% (7 siswa).

PENUTUP

Simpulan

Dari penelitian dan pengumpulan (observasi, wawancara dan dokumentasi) yang dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa interaksi yang dilakukan guru dan siswa sangat mempengaruhi kesuksesan kegiatan pembelajaran khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegeraa. Interaksi tersebut juga mempengaruhi

kebebasan berpendapat yang dilakukan siswa.

Siswa akan lebih leluasa dalam mengemukakan pendapat, jika guru berinteraksi dengan baik terhadap siswa. Kebebasan berpendapat siswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegeraan meningkat dipengaruhi oleh interaksi guru dengan siswa.

Peningkatan tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya siswa yang berani dan bebas mengemukakan pendapatnya, yaitu pada observasi pertama hanya 2 siswa atau 8% dari jumlah keseluruhan yang berani mengemukakan pendapat. Lalu observasi kedua meningkat menjadi 6 siswa atau 24%, pertemuan ketiga meningkat menjadi 15 siswa atau 60%, dan observasi terakhir hamper semua siswa bebas mengemukakan pendapatnya ada 22 siswa atau 88% dari jumlah keseluruhan siswa.

Dengan demikian secara klasikal kebebasan berpendapat siswa dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegeraan yang dipengaruhi oleh interaksi guru dan siswa telah mencapai kriteria yang ditargetkan, yaitu lebih dari 50% siswa sudah berani dan bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haryati, Sri. Machmud Al Rasyid, dkk. 2009. *Pendidikan*

- Kewarganegaraan*.
Surakarta: Mata Padi
Pressindo.
- Hébert, Yvonne dan Alan Sears.
2010. *Citizenship
Education In Canada*.
Canada: Canadian
Education Assosiation.
- Hidayat, Komaruddin dan
Azyumardi Azra. 2008.
*Pendidikan
Kewarganegaraan (Civic
Education) Demokrasi
Hak Asasi Manusia dan
Masyarakat
Madani*. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.
- Kaelan. 2010. *Pendidikan
Pancasila*. Yogyakarta:
Pradigma.
- Sarwono, Jonathan. 2006.
*Metode Penelitian
Kuantitatif dan Kualitatif*.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Septian, Albitar.dkk. 2010.
*Analisis Tuturan Guru
dalam Interaksi Belajar
Mengajar pada Kelas V
SDN Sumpersari 1*.
Malang: Universitas Negeri
Malang.
- Sugiyono. 2014. *Metode
Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D*.
Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, S. Nana. 2013.
*Metode Penelitian
Pendidikan*. Bandung: PT
Media Rosdakarya.
- Winarno. 2014. *Pembelajaran
Pendidikan
Kewarganegaraan(Isi,
Strategi, dan Penilaian)*.
Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode
Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, dan Penelitian
Gabungan*. Jakarta:
Prenamedia Group.
- Zayed, Niveen Mohammad. 2014.
*Teachers' and Students'
Practice of Speech
Acts in the Classroom*. Amerika:
International Journal on
Studies in English
Language and Literature
(IJSELL)..

PERAN LSM/NGO DALAM PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN BAGI NARAPIDANA ANAK

Mitayuanisya Dyahnisita Nurani

Prodi S2 PGSD Pascasarjana UNS

Email: Mitayauansya@student.uns.ac.id

Abstract : *The purpose of this study was to determine the conduct of Children's Education in prisons. This research is a qualitative research. Subjects were prisons Children in Klaten. Collecting data in this study using interviews and select informants related to the research problem and can be trusted to be a valid data source. The conclusions of this research is the implementation of education and teaching in prisons Children Klaten is going according to the Indonesian Government Regulation No. 32 of 1999 on the Terms and Procedures for Citizens Rights Patronage Correctional particularly set on Rights and Duties of Prisoners and Correctional Learners. Terlaksannya evidence of education and teaching in prisons Children Klaten is the cooperation between the prisons by the Department of Education. Activity that takes place is a learning activity by bringing in teachers from the Department of Education. NGOs here also take an active role in the implementation of informal education in prisons Children Klaten, by giving them the form of educational skills that are useful to prepare in Students of Corrections to be better prepared to work in the community after from prisons later.*

Keywords: *Role of NGOs, Children's Education in prisons, Child prisoners*

PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki hak yang sama. Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-4 menjelaskan bahwa "...

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...". Maka pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab negara untuk melindungi hak setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Hal ini berkaitan dengan pasal 28B ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang terutama dalam bidang pendidikan.

Hal ini juga berkaitan dengan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Tidak terkecuali pendidikan untuk narapidana anak agar dapat memperbaiki kehidupannya setelah hukumannya selesai.

Anak adalah salah satu bagian terpenting yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan sebuah negara. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pendidikan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social serta perlindungan dari hal yang membahayakan mereka.

Dalam hal upaya perlindungan tersebut, kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari ini terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar

hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Seiring dengan laju perkembangan industrialisasi dan urbanisasi tingkat kejahatan semakin meningkat. Bentuk dan jenis kejahatan ternyata bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja, akan tetapi anak-anak juga melakukan kejahatan. Sehingga pelaku kajahatan tersebut dijatuhi hukuman pidana, salah satunya pidana penjara.

Walaupun demikian negara harus tetap memenuhi hak-hak anak tersebut. termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam proses pengolahan datanya, peneliti mengolah dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengamati serta menggambarkan bagaimana peran LSM dalam meningkatkan akses pendidikan bagi narapidana anak

Penelitian ini dilakukan di LSM Kapas. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui penggalan informasi dari anggota LSM Kapas Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian, monografi, karena data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.

Populasi dan sampel penelitian yang terkait dengan masalah penelitian ini adalah Anak binaan dalam LAPAS Anak Klaten. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, sampel yang bertujuan. Dimana peneliti cenderung memilih informan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang valid. Informan yang dianggap dapat mewakili dalam memberikan informasi yang sesuai dengan kajian yang diteliti informan tersebut adalah anggota LSM

Dalam rangka mempermudah proses pengumpulan data dan mengangkat data pada penelitian ini maka digunakan beberapa metode yang pertama wawancara. Metode wawancara disebut juga metode interview adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan wawancara dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 2002: 135) Dalam hal ini peneliti mewawancarai responden terkait yaitu pihak dari LSM Kapas dan pihak lain yang terkait dengan penelitian

Metode yang kedua adalah observasi. Metode observasi adalah suatu sistem atau cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui Peran LSM Kapas dalam meningkatkan akses pendidikan bagi narapidana anak di lapas Klaten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari proses wawancara didapatkan hasil bahwa pada LAPAS Anak yang bertempat di Klaten telah memenuhi dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan khususnya mengatur tentang Hak dan Kewajiban Narapidana dan Anak Didik Masyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara didapati selama ini kegiatan yang ada di LAPAS Klaten bersumber dari LSM dan dari pihak LAPAS sendiri. Kegiatan dari LSM berupa kegiatan pendidikan informal khususnya keterampilan yang bertujuan menyiapkan Anak Didik Masyarakatan agar, setelah keluar dan kembali ke masyarakat bisa lebih siap bekerja sesuai keahlian. Sedangkan kegiatan dari pihak

LAPAS sendiri berupa kegiatan pendidikan formal yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kegiatan tersebut berupa kegiatan pembelajaran dengan mendatangkan pengajar dari Dinas Pendidikan. Kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan secara rutin antara 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu sekali.

Jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan LSM dan dari pihak LAPAS sendiri berbeda. Pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan yang dilakukan di LAPAS Anak Klaten memanfaatkan ruangan pada Gereja yang berada di dalam LAPAS

Jangka waktu dalam menempuh pendidikan formal di dalam LAPAS disesuaikan dengan kelas terakhir sebelum anak binaan yang bersangkutan masuk LAPAS. Bagi anak binaan yang tidak menempuh pendidikan formal sebelum masuk LAPAS maka akan ditentukan sesuai usia dan kemampuan belajar. Anak didik pemasyarakatan yang ada di LAPAS Anak Klaten juga menerima Ijazah. Ijazah yang diterima berupa ijazah kejar paket dan bisa digunakan setelah keluar dari LAPAS, berlaku bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang telah menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Menurut pendapat saya pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang berlangsung di LAPAS Anak Klaten kurang

optimal terutama pada pendidikan formal dikarenakan rentang waktu pelaksanaan pembelajaran yang terlalu lama yaitu antara 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu. Akan tetapi peran LSM sangat membantu dalam kelangsungan pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS Anak klaten khususnya pada pendidikan informal. LSM memberikan bekal berupa pendidikan keterampilan yang nantinya berguna untuk mempersiapkan Anak Didik Pemasyarakatan agar lebih siap bekerja saat berada di masyarakat.

Pembahasan

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.

Anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja dewasa, dan lanjut usia, akan berlain psikis maupun jasmaninya.

Sistem penilaian anak-anak ini dengan bantuan usaha pendidikan harus bisa dikaitkan atau disesuaikan dengan sistem penilaian manusia dewasa. Namun demikian adalah salah apabila menerapkan kadar nilai orang dewasa pada diri anak-anak. Untuk memudahkan dalam mengerti tentang anak dan menghindari salah penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu diketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak.

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada parabelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase yaitu :

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu :

- a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual.
 - b. Masa remaja/ pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*.
3. Fase ketiga dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 fase yaitu :

- a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa *puberal*/ pra pubertas
- b. Masa menentang kedua, fase negatif, *trozalter* kedua, periode *verneinung*
- c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki
- d. Fase *adolescence*, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 9 hingga 21 tahun.

Fase ketiga ini mencakup point c dan d di atas, di dalam periode ini terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan

yang menunjukkan ke arah gejala kanakalan anak

Yang dimaksud kenakalan anak menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah :

1. Anak yang melakukan tindakan pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak dipengaruhi motifasi yaitu dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motifasi itu ada 2 (dua) macam motifasi intrinsik dan motifasi ekstrinsik, yang termasuk didalamnya diantaranya :

1. Motifasi Intrinsik dari kenakalan anak-anak adalah :
 - a. Faktor intelegentia
 - b. Faktor usia
 - c. Faktor kelamin
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga
2. Motifasi Ekstrinsik dari kenakalan anak-anak adalah :
 - a. Faktor rumah tangga
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah
 - c. Faktor pergaulan anak
 - d. Faktor mass media

Batas Usia Bagi Pidanaan Anak Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Batas usia bagi pidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Sekarang timbul pertanyaan apabila pelaku kejahatan adalah anak di bawah usia minimum yang ditentukan, dapatkah dipidana serta tindakan apa yang diambil dann apa dasar hukumnya?

Dapat disimak pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang menegaskan bahwa :

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diberi pengertian sebagai berikut :
Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari

sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Secara umum, yang dimaksud Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Dari pengertian di atas, terlihat adanya perbedaan penamaan antara narapidana dan anak didik pemasyarakatan, walaupun, secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni LAPAS berdasarkan putusan pengadilan. Perbedaan penamaan ini tidak dijelaskan oleh undang-undang, namun dapat diperhatikan bahwa penamaan "anak didik pemasyarakatan" bukan "narapidana anak" karena pengaruh oleh gaya bahasa. Dengan menggunakan istilah anak didik pemasyarakatan tersebut merupakan ungkapan halus untuk menggantikan istilah narapidana anak yang dirasakan menyinggung perasaan dan mensugestikan sesuatu yang tidak mengenakan bagi anak.

Sementara fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan, yakni :

1. Anak pidana

2. Anak negara

3. Anak sipil

Pada dasarnya, pembinaan anak didik pemasyarakatan harus dalam LAPAS anak, terpisah dengan pembinaan orang dewasa/ narapidana. Hal ini secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 60 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Prinsip ini tetap dipegang walupun pada suatu daerah belum ada LAPAS Anak,, tetapi anak didik pemasyarakatan ditempatkan terpisah dengan orang dewasa.

Anak yang ditempatkan di LAPAS Anak, berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formil maupun informil sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya.

Ada jangka waktu dan kriteria tertentu seseorang anak tidak lagi berada di LAPAS Anak. Menurut Pasal 61, 62 UU Pengadilan Anak, maka seorang anak tidak berada di LAPAS Anak dalam hal :

1. Telah selesai menjalani pidananya
2. Belum selesai menjalani pidananya akan tetapi telah berumur 18 tahun dan belum mencapai 21 tahun, dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang yang telah mencapai umur 21 tahun
3. Pembebasan bersyarat

Anak Didik Pemasyarakatan dan Hak-haknya

Anak Didik Pemasyarakatan di dalam Lapas mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan sesuai dengan keterianya masing masing. Kriterianya sebagai berikut :

1. Anak Pidana

Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Berdasarkan Pasal 20 UU Pemasyarakatan, penggolongan pembinaan Anak Pidana atas dasar :

- a. Umur
- b. Jenis kelamin
- c. Lama pidana yang dijatuhkan
- d. Jenis kejahatan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Hak-hak Anak Pidana seperti yang diatur dalam Pasal 22 UU Pemasyarakatan, adalah :

- a. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. Berhak mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Berhak mendapat pendidikan dan pengajaran
- d. Berhak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Berhak menyampaikan keluhan
- f. Berhak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media masaa lainnya yang tidak dilarang

- g. Berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- h. Berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- i. Berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- j. Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat
- k. Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- l. Berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya, Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu dan anak pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepetingan :

- Pembinaan
- Keamanan dan ketertiban
- Pendidikan
- Proses peradilan dan
- Lainnya yang dianggap perlu

2. Anak Negara

Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling laa sampai berumur 18 tahun.

Berdasarkan Pasal 27 UU Perasyarakatan, penggolongan pembinaan anak negara atas dasar :

- a. Umur

b. Jenis kelamin

c. Lamanya pembinaan

d. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Hak-hak Anak Negara seperti yang diatur dalam Pasal 29 UU Perasyarakatan, adalah :

- a. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. Berhak mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Berhak mendapat pendidikan dan pengajaran
- d. Berhak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Berhak menyampaikan keluhan
- f. Berhak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang
- g. Berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- h. Berhak mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- i. Berhak mendapat pembebasan bersyarat
- j. Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas
- k. Berhak mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Anak Negara tidak berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya dan juga tidak berhak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), karena dia bukan dipidana. Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program

pembinaan dan kegiatan tertentu, dan dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lainnya. Alasan pemindahan itu adalah untuk :

- Pembinaan
- Keamanan dan ketertiban
- Pendidikan
- Lainnya yang dianggap perlu

3. Anak Sipil

Anak Sipil adalah anak yang tidak mampu lagi dididik oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya dan karenanya atas penetapan pengadilan ditempatkan di Lembaga Perasyarakatan Anak untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya. Pasal 384 KUH Perdata mengatakan dasar penempatan menempatkan si anak menjadi Anak Sipil haruslah berdasarkan alasan-alasan yang sungguh-sungguh merasa tak puas atas kelakuan si anak yang belum dewasa.

Penempatan Anak Sipil

Menurut pasal 32 UU Perasyarakatan, anak sipil ditempatkan di LAPAS Anak. Penempatan itu paling lama 6 bulan bagi mereka yang belum berumur 14 tahun dan paling lama 1 tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 tahun, dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 tahun.

Sementara menurut ketentuan Pasal 384 KUH Perdata, penempatan anak sipil itu boleh di Lembaga Negara atau Pertikelir/ Swasta yang ditunjuk

oleh Menteri Kehakiman. Penempatan diselenggarakan dengan biaya si anak, orang tua, wali, orang tua asuh, atau atas beban negara.

Hak-hak Anak Sipil

Hak-hak Anak Sipil seperti yang diatur dalam Pasal 36 jo Pasal 14 UU Perasyarakatan, adalah :

- a. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. Berhak mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Berhak mendapat pendidikan dan pengajaran
- d. Berhak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Berhak menyampaikan keluhan
- f. Berhak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang
- g. Berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- h. Berhak mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- i. Berhak mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak anak sipil diatur dengan Peraturan Pemerintah. Perlu dicatat, bahwa Anak Sipil tidak berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya, karena anak belum boleh bekerja. Demikian juga tidak berhak untuk mendapatkan

pengurangan masa pidana (remisi), karena dia bukan dipidana, maupun cuti menjelang bebas.

Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke Lapas Anak lainnya. Alasan pemindahan itu adalah untuk :

- Pembinaan
- Keamanan dan ketertiban
- Pendidikan
- Lainnya yang dianggap perlu.

Hak Anak atas Pendidikan

Salah satu hak Anak Didik Pemasaryakatan di dalam Lapas adalah hak mendapat pendidikan. Hak atas pendidikan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai berikut :

- a. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat (1) UUD)
- b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 ayat (2) UUD).
- c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang (Pasal 31 ayat (3) UUD).

d. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31 ayat (4) UUD).

e. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang (Pasal 28B ayat (1) UUD).

f. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (Pasal 28C ayat (1) UUD).

Selain dalam Undang-Undang yang mengatur hak atas pendidikan terdapat pula, Konvensi Hak Anak sesuai Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang kembali digunakan sebagai alat ukurnya. Hal ini dikarenakan konvensi ini diakui sebagai pengaturan yang paling komprehensif mengenai hak anak dan negara-negara yang meratifikasi wajib melakukan upaya pemenuhannya. Hak-hak anak dalam KHA dapat dikelompokkan menjadi empat bagian besar, sebagai berikut.

1. Akses terhadap pendidikan (Pasal 28 KHA):
 - a. Membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan

- tersedia secara cuma-cuma untuk semua anak.
- b. Mendorong pengembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakan pendidikan tersebut untuk setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti penerapan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan.
 - c. Membuat pendidikan tinggi terjangkau untuk semua anak berdasarkan kemampuan, dengan semua cara yang layak.
 - d. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan penurunan tingkat putus sekolah.
2. Pendidikan bagi anak cacat (Pasal 23 KHA).
 3. Pelaksanaan pendidikan anak:
 - a. Menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan anak dan sesuai dengan Konvensi ini (Pasal 28 KHA)
 - b. Mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan bermain dan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan, dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni (Pasal 31 KHA).
 4. Arah pendidikan anak: (Pasal 29 KHA)
 - a. Pengembangan kepribadian anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
 - b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kemerdekaan hakiki, serta terhadap prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB.
 - c. Pengembangan rasa hormat kepada orangtua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya, nilai-nilai kebangsaan dan negara tempat anak tersebut bertempat tinggal, berasal, dan kepada peradaban-peradaban yang berbeda dan peradabannya sendiri.
 - d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antara sesama, kelompok-kelompok etnik, bangsa dan agama, dan orang-orang pribumi.
 - e. Pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam.
- Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Dalam pelaksanaan hak-hak warga binaan pemsarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang

Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan yaitu pada BAB II Hak Dan Kewajiban Narapidana dan Anak Didik Masyarakatan

Bagian Ketiga Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 9

Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Masyarakatan.

Pasal 10

(1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.

(2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan masyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Pasal 11

(1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Masyarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS.

(2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Masyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS.

(3) Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang

berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.

(4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS.

Pasal 12

Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS.

Pasal 13

Setiap Narapidana dan Anak Didik Masyarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di LAPAS Anak Klaten sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan khususnya mengatur tentang Hak dan Kewajiban Narapidana dan Anak Didik Masyarakatan.

Bukti terlaksananya pendidikan dan pengajaran di LAPAS Anak Klaten adalah adanya kerjasama antara pihak LAPAS dengan Dinas Pendidikan. Kegiatan yang berlangsung adalah kegiatan pembelajaran dengan mendatangkan Guru dari Dinas Pendidikan.

Pihak LSM disini juga ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pendidikan informal di dalam LAPAS Anak Klaten, dengan memberikan bekal berupa pendidikan keterampilan yang berguna untuk menyiapkan Anak Didik Pemasarakatan agar lebih siap bekerja di masyarakat selepas dari LAPAS nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Huraerah Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia: Bandung
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta: Jakarta
- Nasran. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak
- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama: Bandung
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika: Jakarta